

PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

**STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Elli Mayani

NIM : 96 2114 198

NIRM : 96 0051121303120177

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2001**

Skripsi

PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Oleh:

Elli Mayani

NIM : 96 2114 198

NIRM : 96 0051121303120177

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

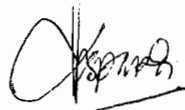
Tanggal : 27 April 2001



Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM., Akt

Pembimbing II

Tanggal : 31 Mei 2001



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt

Skripsi

PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Elli Mayani

NIM : 96 2114 198



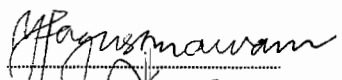


NIRM : 96 0051121303120177

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 23 Juni 2001

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Akt.	
Sekretaris	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	
Anggota	Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM., Akt	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	
Anggota	Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Akt.	

Yogyakarta, 23 Juni 2001
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta



Drs. Hg. Suseno TW., M.S.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Mei 2001

Penulis,



Elli Mayani

ABSTRAK
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PREDIKSI
PENDAPATAN PAJAK DAERAH
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
WONOGIRI

ELLI MAYANI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perkembangan pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame) dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000 dan prediksi pendapatan pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame) dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri, selama bulan Desember 2000 sampai bulan Maret 2001. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah pertama adalah analisis horisontal dengan mengadakan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000. Sedangkan untuk masalah kedua digunakan persamaan trend garis lurus, dari persamaan trend tersebut kemudian dilakukan perhitungan perkiraan/prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) perkembangan pajak daerah Kabupaten Wonogiri dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan atau penurunan realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran disebabkan karena bertambah atau berkurangnya jumlah objek pajak hotel dan restoran di kecamatan Wonogiri serta bertambah atau berkurangnya jumlah pendapatan dari kecamatan-kecamatan lain. Kenaikan realisasi pendapatan pajak hiburan disebabkan bertambahnya pertunjukkan insidental di beberapa kecamatan dan bertambahnya jumlah objek pajak hiburan, sedangkan penurunannya disebabkan berkurangnya pertunjukkan insidental di beberapa kecamatan. Kenaikan realisasi pendapatan pajak reklame disebabkan bertambahnya jumlah pemasang reklame baik dalam bentuk spanduk, selebaran maupun reklame papan, sedang penurunannya disebabkan berkurangnya jumlah pemasang reklame baru, (2) prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun-tahun mendatang mengalami kecenderungan naik. Prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005 secara berurutan sebagai berikut : Rp 106.752.873.00; Rp 115.309.601.00; Rp 123.866.329.00; Rp 132.423.057.00; Rp 140.979.785.00

ABSTRACT

The Development of District Tax Income and The Prediction of District Tax Income A Case Study at Wonogiri Regency

ELLI MAYANI
Sanata Dharma University
Yogyakarta

The aims of the writing of this thesis were to find out the development of district tax income (hotel and restaurant tax, entertainment tax, and advertisement tax) from 1995/1996 period up to 1999/2000 period and to find out prediction of district tax income (hotel and restaurant tax, entertainment tax, and advertisement tax) from 2001 period up to 2005 period.

This study was carried out in the Dinas Pendapatan Daerah in Wonogiri Regency from December 2000 until March 2001. The data collecting techniques applied were observation, interview, and documentation. The data analysis technique for the first problem was Horizontal Analysis by making a comparison between the budget and the realization of the district tax income from 1995/1996 period up to 1999/2000 period. For the second problem, Straight Line Trend Equation was employed. From that trend, a projection or prediction was made of the district tax income for the annual budget of 2001 up to 2005.

The result of the study showed that (1) the development of the district tax income in Wonogiri regency from 1995/1996 period up to 1999/2000 period had an increase and decrease. The increase or decrease of the realization of hotel and restaurant tax income was caused by increasing and decreasing tax object in Wonogiri district and also the increasing or decreasing of the amount of the income in other districts. The increase of the entertainment tax income realization was caused by increasing incidental shows in some districts and the increasing of the number of entertainment tax objects while the decrease was caused by the decreasing of incidental shows in some districts. The increase of the advertisement tax income realization was caused by the increasing of the number of advertisers in the forms of banners, brochures, and also billboard while the decrease was caused by the decreasing of the number of new advertisers and (2) the predictions of the district tax income for the following years tend to go up. The predictions of the district tax income from 2001 period up 2005 period were consecutively as follows: Rp 106.752.873,00; Rp 115.309.601,00; Rp 123.866.329,00; Rp 132.423.057,00; Rp 140.979.785.00.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kasih atas segala kuasa dan rahmat-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi.

Keterbatasan dalam diri penulis menyebabkan banyaknya kendala dalam proses penyusunan skripsi ini, namun dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ibu Dra. YFG. Agustinawansari, MM., Akt, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. YP. Supardiyono, Msi., Akt, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan untuk penyempurnaan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. I. Kuntoro M, Akt, yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Adhi Sutanto, selaku Kepala Bagian Pendataan dan Pelaporan yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan semua informasi dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Papa, Mama, *all of my brothers* dan keluarga besarku yang selalu mendukung material dan spiritual. Yanik yang setia mengetik buat skripsiku, terima kasih banget.
7. Teman-temanku Jurusan Akuntansi Angkatan 1996 C : Nini, Rosy, Heni, Rina, Derta, Ndub-ndub, Yogo, Simbah, Didik Nur, Moko, Tiyong, Aris, Kawoel, Lilik trim's atas dukungan, saran, masukan maupun atas "guyonannya".
8. Teman-temanku di Beo 10 : Christine, Cik Mar, Ninik, Femi, Nining dan Ari, trim's untuk segala bantuan dan kebersamaannya.
9. Sahabat-sahabatku Candra, Arum dan Tanti, trim's untuk persahabatannya yang manis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Juni 2001

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	1
C. Rumusan Masalah	2
D. Tujuan Penelitian	2
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Pajak	5
B. Fungsi Pajak	6
C. Jenis-jenis Pajak	7
D. Syarat Pemungutan Pajak	8
E. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	9

F. Pajak Daerah	11
G. Tarif Pajak	14
H. Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	23
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Data Yang Dicari	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI	37
A. Sejarah Pembentukan Kabupaten Wonogiri	37
B. Keadaan Wilayah	39
C. Keadaan Penduduk	40
D. Keadaan Ekonomi	41
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	44
A. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000	45
B. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005	60
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan Penelitian	72
C. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 3.1	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1995/1996.....	32
Tabel 3.2	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1996/1997.....	32
Tabel 3.3	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1997/1998.....	33
Tabel 3.4	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1998/1999	33
Tabel 3.5	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1999/2000	34
Tabel 3.6	Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Daerah.....	36
Tabel 5.1	Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000	47
Tabel 5.2	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000	48
Tabel 5.3	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1995/1996	49
Tabel 5.4	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1996/1997	50

Tabel 5.5	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998	52
Tabel 5.6	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1998/1999	53
Tabel 5.7	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1999/2000	54
Tabel 5.8	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Bulan April-Desember 2000	56
Tabel 5.9	Perkembangan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000	59
Tabel 5.10	Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Reklame	60
Tabel 5.11	Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran	63
Tabel 5.12	Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Hiburan	65

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame dari Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000	57
Grafik 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran dari Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000	57
Grafik 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan dari Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000	58
Grafik 5.4 Prediksi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005	61
Grafik 5.5 Prediksi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005	64
Grafik 5.6 Prediksi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005	66
Grafik 5.7 Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam suatu daerah tidak terlepas dari sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut. Salah satu sumber penerimaan daerah menurut UU No.25 Tahun 1999 adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak dalam suatu daerah menjadi hal yang penting karena dari pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pajak daerah selalu mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun dapat berupa kenaikan atau penurunan penerimaan pajak. Kenaikan atau penurunan tersebut dapat dianalisis penyebabnya. Penerimaan pajak juga dapat diprediksi untuk beberapa tahun

yang akan datang berdasarkan data penerimaan pajak tahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah tingkat II yang meliputi pajak reklame, pajak hotel dan restoran dan pajak hiburan, serta prediksinya selama lima tahun mendatang.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pendapatan pajak daerah tingkat II yang meliputi pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pendapatan pajak daerah tingkat II Wonogiri (pajak hotel dan restoran, pajak reklame dan pajak hiburan) dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun 1999/2000?
2. Bagaimana prediksi pendapatan pajak daerah tingkat II (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame) untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan 2005?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah tingkat II (pajak hotel dan restoran, pajak reklame dan pajak hiburan) dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun 1999/2000.

2. Untuk mengetahui prediksi pendapatan pajak daerah tingkat II (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame) untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak-pihak yang berminat terhadap topik pajak daerah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah pada objek yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori-teori dari hasil studi pustaka yang dijadikan dasar untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

Bab ini berisi tentang keadaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara umum berdasarkan data – data yang diperoleh.

Bab V. Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan metode dan teknik yang diuraikan pada bagian metodologi penelitian.

Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh langkah proses pembahasan dan analisis data hasil penelitian serta berisi beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak menurut Tubagus Chairil Amadi Zandjani dalam buku Perpajakan(1992:1) yaitu :

Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Rachmat Soemitro seperti yang dikutip oleh Munawir dalam buku Perpajakan (1990:1) yaitu :

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor penerimaan) berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*legen prestaties*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum/pemerintah.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pajak mempunyai unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan undang-undang dan peraturan.
3. Dapat dipaksakan.
4. Tanpa jasa timbal balik(kontra prestasi) langsung.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum/pemerintah.

B. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler*. Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak di sini merupakan alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Rachmat Soemitro dalam buku Pajak dan Pembangunan (1988:109), pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa yang lazim disebut surplus, maka surplus tersebut dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

Fungsi *reguler* yaitu sebagai pengatur atau pelaksana kebijaksanaan pemerintah dalam sosial dan ekonomi. Fungsi *reguler* juga mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan perpajakan kepada masyarakat, cara pengaturan tarif pajak yang ada harus sesuai dengan kekuatan masyarakat wajib pajak. Misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan barang-barang mewah dan pajak ekspor ditetapkan sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

C. Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (1997 : 6-7) dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Menurut pihak yang memungut, pajak digolongkan menjadi 2, yaitu :
 1. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparaturnya yaitu Direktorat Jendral Pajak dan kantor-kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil dari pemungutan pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan.
 2. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah.
- b. Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi :
 1. Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain serta dipungut secara berkala.
 2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dipungut kalau ada peristiwa perbuatan tertentu dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain.

c. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Pajak Subyektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak(subyek) kemudian menetapkan obyek pajaknya. Contoh pajak subyektif adalah PPh.
2. Pajak Obyektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan obyeknya yaitu benda, keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak kemudian ditetapkan subyeknya, tanpa memperhatikan apakah subyek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Contoh pajak obyektif adalah PPN dan PPnBM serta PBB.

D. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (1997 : 2-3) pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil.

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (syarat yuridis)

Di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus bisa ditekan, sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

E. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi sokongan (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari penerimaan dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
- b. Sederhana
- c. Jenisnya tidak terlalu banyak
- d. Lapangan pajaknya tidak melampaui/ mencampuri pajak pusat
- e. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut
- f. Biaya administrasinya rendah
- g. Beban pajak relatif seimbang
- h. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional

2. Sumber Keuangan Daerah

Menurut UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 4, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

F. Pajak Daerah

1. Dasar hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah UU No. 18 Tahun 1997.

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

3. Peraturan Daerah tentang Pajak

Peraturan daerah tentang pajak mengatur sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

- a. nama, objek, dan subjek pajak
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
- c. wilayah pemungutan
- d. masa pajak
- e. penetapan
- f. tata cara pembayaran dan penagihan
- g. kedaluwarsa

- h. sanksi administrasi
- i. tanggal mulai berlakunya

Dalam pasal 4 ayat 4 UU No. 18 tahun 1997 disebutkan bahwa peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya
- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa
- c. azas timbal balik

4. Pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah Daerah Tingkat II

Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat II adalah:

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

5. Prosedur Pengesahan Pajak Daerah

Prosedur pengesahan peraturan daerah mengenai pajak daerah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997. Peraturan daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan

pengesahan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur yang bersangkutan. Penyampaian peraturan daerah tersebut sebanyak 8 eksemplar.

Peraturan daerah seluruhnya ditandatangani dan stempel asli serta dilampiri risalah sidang sebanyak 2 eksemplar. Unit pengolah dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sesudah peraturan daerah diterima, memberitahukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota/madya bahwa peraturan daerah dimaksud telah diterima, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan setelah menerima tembusan peraturan daerah dalam waktu secepatnya memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri.

Jangka waktu pengesahan peraturan daerah terdiri dari jangka waktu pertama dan jangka waktu kedua. Jangka waktu pertama adalah jangka waktu selama 3 bulan sejak peraturan daerah diterima oleh Menteri Dalam Negeri. Jangka waktu kedua adalah jangka waktu selama 3 bulan sejak berakhirnya jangka waktu pertama.

Setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengesahkan, menolak untuk mengesahkan atau meminta peraturan daerah untuk disempurnakan terlebih dahulu. Apabila peraturan daerah ditolak untuk disahkan atau diminta untuk disempurnakan terlebih dahulu, Menteri Dalam Negeri memberikan alasan penolakan atau saran penyempurnaan. Berdasarkan saran penyempurnaan, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah.

Peraturan daerah yang telah disempurnakan, disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan. Apabila peraturan daerah yang dimintakan pengesahan telah memenuhi persyaratan formal dan material, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya harus sudah mendapat pengesahan. Peraturan daerah yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri segera disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota/madya yang bersangkutan.

G. Tarif Pajak Daerah

1. Pajak Hotel dan Restoran

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya pajak hotel dan restoran adalah Peraturan Daerah tingkat II Wonogiri Nomor 1 tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak hotel dan restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran.

c. Objek dan Subjek Pajak Hotel dan Restoran

Objek pajak hotel dan restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan, dengan pembayaran di hotel dan restoran. Objek pajak yang dimaksud meliputi:

1. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan

(hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos, dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

2. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimil, teleks, *foto copy*, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
5. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Objek pajak yang dikecualikan adalah:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
2. Asrama dan pesantren.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum hotel.
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

6. Pelayanan jasa boga atau katering.
7. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, sedangkan besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran.

2. Pajak Hiburan

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya pajak hiburan adalah Peraturan Daerah tingkat II Wonogiri Nomor 2 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian,

dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

c. Objek dan Subjek Pajak

Objek pajak adalah semua penyelenggara hiburan. Hiburan yang dimaksud antara lain pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan *Billyard*, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut :

1. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
 - a. Golongan A II utama sebesar 30%
 - b. Golongan A II sebesar 28%
 - c. Golongan A I sebesar 26%
 - d. Golongan B II sebesar 24%

- e. Golongan B I sebesar 20%
 - f. Golongan C sebesar 17%
 - g. Golongan D sebesar 13%
 - h. Jenis keliling sebesar 10%
2. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10%.
 3. Untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10%
 4. Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 25%
 5. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25%
 6. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 25%
 7. Untuk permainan *Billyard* ditetapkan sebesar 15%
 8. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%
 9. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 20%
 10. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
 11. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10%

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak di atas dengan dasar pengenaan pajak. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

3. Pajak Reklame

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya pajak reklame adalah Peraturan Daerah tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Objek dan Subjek Pajak

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame tersebut meliputi :

1. Reklame Papan/*Bilboard/Megatron*
2. Reklame kain
3. Reklame melekat (stiker)
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame udara

7. Reklame suara
8. Reklame film/slide
9. Reklame peragaan

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

1. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
3. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Subjek pajak adalah badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). NSR dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa

pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Hasil perhitungan nilai sewa reklame terdapat di lampiran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dan besarnya pajak reklame ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

e. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Berdasarkan SPTPD, Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). SKPDKB diterbitkan :

- 1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terutangnya pajak.
- 2). Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 3). Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

H. Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan – ketentuan pajak di bawah ini berlaku untuk semua jenis pajak di atas, kecuali untuk tata cara perhitungan dan penetapan pajak reklame telah disebutkan di atas. Ketentuan – ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Berdasarkan SPTPD Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

SKPDKB diterbitkan apabila :

1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2. Tata Cara Pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat



mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3. Tata Cara Penagihan Pajak

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara (KLN). Setelah KLN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

4. Keberatan dan Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN. Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 12 bulan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan.

5. Kedaluwarsa

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah. Kedaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

6. Ketentuan Pidana

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus yaitu jenis penelitian terhadap suatu objek tertentu dalam perusahaan, adapun hasil yang diperoleh dari analisis hanya berlaku untuk objek tertentu dan dalam waktu tertentu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi : Penelitian dilakukan di Pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri.

Waktu : Penelitian dilakukan dari bulan Desember 2000 sampai dengan bulan Maret 2001.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah sub dinas pendapatan dan dinas anggaran Daerah Tingkat II.

2. Objek Penelitian

Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri yang berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame untuk tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000.

D. Data Yang Dicari

1. Gambaran umum Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri.
2. Data pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame yang dipungut oleh Pemda Dati II Wonogiri.
3. Data mengenai prosedur pemungutan pajak Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri, khususnya mengenai pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai bagian keuangan yang mengurus pajak daerah.

2. Dokumentasi

Yaitu cara mengumpulkan data dengan melihat data dari perusahaan yang diteliti.

3. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui pengamatan langsung terhadap objek dan keadaan yang diteliti serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Metode ini digunakan untuk memperjelas serta untuk membuktikan

kebenaran-kebenaran data yang telah diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan analisis horisontal. Analisis horisontal adalah analisis dengan menggunakan perbandingan pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000. Setelah dilakukan perbandingan maka akan diketahui perkembangan yang terjadi dari pendapatan pajak daerah. Analisis perbandingan ini dapat ditunjukkan dalam:

1. Data absolut atau jumlah dalam rupiah

Diperoleh dari selisih jumlah rupiah tiap sektor pajak antara anggaran dengan realisasi pada setiap tahun anggaran (dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun 1999/2000).

2. Kenaikan/ penurunan dalam prosentase

Dihitung dengan membagi jumlah pertambahan atau pengurangan dari anggaran pendapatan pajak daerah dengan jumlah realisasi pendapatan pajak daerah pada setiap tahun anggaran.

Lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Untuk Tahun Anggaran 1995/1996

Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1995/1996		Kenaikan/Penurunan Realisasi	
	Anggaran	Realisasi	Rp (A)	% (B)
-				
-				
-				
Jumlah				

Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Untuk Tahun Anggaran 1996/1997

Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1996/1997		Kenaikan/Penurunan Realisasi	
	Anggaran	Realisasi	Rp (A)	% (B)
-				
-				
-				
Jumlah				

Tabel 3.3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Untuk Tahun Anggaran 1997/1998

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Kenaikan/Penurunan	
	1997/1998		Realisasi	
	Anggaran	Realisasi	Rp (A)	% (B)
-				
-				
-				
Jumlah				

Tabel 3.4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Untuk Tahun Anggaran 1998/1999

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Kenaikan/Penurunan	
	1998/1999		Realisasi	
	Anggaran	Realisasi	Rp (A)	% (B)
-				
-				
-				
Jumlah				

Tabel 3.5
Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Untuk Tahun Anggaran 1999/2000

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Kenaikan/Penurunan	
	1998/1999		Realisasi	
	Anggaran	Realisasi	Rp (A)	% (B)
-				
-				
-				
Jumlah				

Keterangan:

A = Perubahan yang terjadi dalam absolutnya (jumlah dalam rupiah) diperoleh dari selisih antara anggaran pendapatan pajak daerah diperbandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran yang diperbandingkan

B = Pertambahan atau pengurangan yang ditunjukkan dalam prosentase, dihitung dari hasil yang diperoleh pada huruf A dibagi dengan anggaran pendapatan pajak daerah tahun anggaran yang diperbandingkan.

Setelah analisis terhadap perkembangan pendapatan pajak daerah diketahui, yaitu apakah mengalami penurunan atau kenaikan, lalu dicari apa yang mempengaruhi dan yang menjadi penyebab kenaikan atau penurunan terhadap pendapatan pajak daerah tersebut.

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan teknik peramalan yaitu trend garis lurus. Rumusnya adalah:

$$Y = a + bX$$

di mana;

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

dengan syarat $\sum X = 0$

Keterangan:

Y = Variabel yang diramalkan, dalam hal ini adalah pendapatan pajak daerah.

a = Konstanta, yang akan menunjukkan besarnya harga Y apabila X = 0.

b = Variabilitas per X yaitu menunjukkan besarnya perubahan nilai Y dari setiap perubahan satu unit X.

n = Jumlah data, yaitu dari tahun anggaran 1995/1996 sampai 1999/2000.

Untuk mempermudah penyelesaian rumus-rumus tersebut maka digunakan tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Perhitungan Trend
Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Y	X	XY	X ²
1995/1996		-2		4
1996/1997		-1		1
1997/1998		0		0
1998/1999		1		1
1999/2000		2		4
Jumlah		0		10

Setelah diperoleh persamaan $Y = a + bX$ maka dapat dilakukan perhitungan prakiraan pendapatan pajak daerah untuk tahun mendatang. Untuk prakiraan tahun anggaran 2001 maka $X = 3$, untuk tahun anggaran 2002 $X = 4$ dan seterusnya sampai tahun anggaran 2005. Setelah prakiraan pendapatan pajak daerah diketahui maka dapat dibuat penerapan garis trend.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

A. Sejarah Pembentukan Kabupaten Wonogiri

1. Sebelum Kemerdekaan

Dalam sejarah, daerah Wonogiri menjadi wilayah yang penting untuk pemerintahan kerajaan Zaman Hindu, Zaman Islam, bahkan pada zaman pergerakan nasional dan pada zaman setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan pada fakta-fakta sejarah, sejak abad VIII daerah Wonogiri sudah menjadi daerah yang sangat penting, karena Wonogiri memiliki letak yang strategis. Wonogiri terletak antara Sukoharjo dan Panambangan yang merupakan daerah kekuasaan Raja Balitung yang pada saat itu berkuasa.

Asal usul nama Wonogiri berasal dari kata wono yang berarti hutan (alas) dan giri berarti gunung (kata dasar dari pegunungan). Mengenai kapan nama ini mulai dipakai belum jelas, sebab nama ini baru dikenal menurut sumber yang sudah diketemukan tahun 1947. Pada waktu perjanjian Giyanti (1755), yaitu pembagian kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, daerah yang kemudian disebut Wonogiri itu menjadi bagian (masuk) wilayah Kasunanan Surakarta. Akan tetapi, di dalam perjanjian Salatiga (1757), daerah itu diberikan oleh Susuhunan kepada Raden Mas Said yaitu meliputi

Keduang, Laroh, Wiroko, Sembuyan dan Honggobayan. Daerah-daerah itu yang kemudian digabungkan menjadi satu daerah yang disebut Wonogiri.

Pada tahun 1847, Residen Surakarta Baron De Geer mengusulkan kepada Mangkunegara III supaya wilayah Mangkunegaran dibagi menjadi tiga daerah *Onderregent* (kawedanan). Ketiga *Onderregent* itu adalah:

1. *Onderregent* Wonogiri meliputi bagian tengah wilayah Mangkunegaran yaitu Nglaroh, Sembuyan, Keduwang, Honggobayan dan Wiroko.
2. *Onderregent* Karanganyar meliputi daerah timur laut yaitu sebagian dari Sukowati, Matesih dan Haribaya.
3. *Onderregent* Malangjiwan meliputi bagian barat yaitu dari daerah Pajang Lama.

Pada tahun 1917, Kawedanan Wonogiri dan Karanganyar statusnya diubah menjadi Kabupaten. Sebagai tindak lanjut dari perubahan itu, enam daerah Kapanewon (kecamatan) seperti Wonogiri, Ngadiraja, Jatisrana, Jatipura, Purwantara, Wuryantara, juga diubah menjadi kawedanan. Pada tahun 1946, di Mangkunegaran terjadi keresahan sosial berkenaan dengan perasaan anti swapraja (pemerintahan Mangkunegaran), Wonogiri lepas dari swapraja bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia, menjadi Kabupaten Wonogiri.

Dengan dikeluarkannya Penetapan Pemerintah No 16/SD. Tahun 1946 dimana Surakarta berstatus Karesidenan yang dilengkapi terbentuknya Badan Perwakilan Rakyat (BPR), maka sejalan dengan hal itu Wonogiri juga membentuk BPR yang berjumlah 50 anggota dan

ketuanya Sutojo Hardjorekso (Bupati) dengan wakil Mochtar Muhammadiyah. Keputusan penting yang diambil dalam rapat paripurna BPR ialah Wonogiri tidak menghendaki kembalinya Swapraja Mangkunegaran.

Selama Clash II Bupati Sutojo Hardjoreksoko tertangkap Belanda kemudian menggabungkan diri pada Praja Mangkunegaran yang dihidupkan kembali oleh Belanda. Anggota Badan Eksekutif dan staf pemerintah Kabupaten Wonogiri pecah menjadi dua, ada yang memihak Mangkunegaran dan ada yang setia pada Pemerintah RI. Yang setia kepada RI keluar kota menggabungkan diri pada Pemerintah Militer. Karena keadaan tersebut maka dibentuklah pemerintahan darurat sampai pengakuan kedaulatan. Setelah pengakuan kedaulatan RI akibat KMB, pemerintahan militer (Wonogiri) melepaskan staf bagian sipilnya. Sejak itu Badan Eksekutif aktif lagi dan diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) menurut PP 39 Tahun 1950.

2. Setelah Kemerdekaan

Pada tanggal 30 November 1950 pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri meresmikan terbentuknya DPRDS sebagai alat demokrasi untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1948 dan No. 13 Tahun 1950. Beranjak dari tahun 1950, rakyat Wonogiri telah berhasil melangkahakan kakinya menuju terwujudnya suatu pemerintahan daerah yang demokrasi. Pengertian pemerintahan demokratis dalam konteks ini, lebih tepat diartikan sebagai suatu masa peralihan dari suatu sistem pemerintahan kerajaan (Praja Mangkunegaran)

berubah ke arah pemerintahan daerah yang dipimpin oleh wakil rakyat. Pemerintahan pada saat itu dikerjakan secara *collegial* (bersama) antara badan legislatif dan eksekutif.

Pemerintahan secara *collegial* berlangsung sampai dengan tahun 1959, yaitu saat dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tahun 1959 di Indonesia dilaksanakan Demokrasi Terpimpin, yang pengaruhnya sangat besar bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia, terutama dalam kehidupan politik. Kekuasaan Presiden bertambah besar, partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) telah dibubarkan pada tahun 1960. Akibatnya dua partai ini tidak terdapat di Wonogiri, hal ini menyebabkan bertambah kuatnya dua partai lain yaitu PNI dan PKI.

Pada saat pecahnya pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, karena bubarnya Masyumi tahun 1960, justru kaum Islam gigih menumpas G30S/PKI, seperti yang dilakukan kaum Islam di seluruh Indonesia. Lahirnya Orde Baru 1966 membawa perubahan di daerah-daerah seluruh Indonesia, daerah Wonogiri mulai berbenah diri di bidang politik dan pemerintahan, ialah dengan membersihkan badan-badan politik dan pemerintahan dari pengaruh G30S/PKI. Dan mulailah usaha pembangunan daerah sesuai dengan pola Pembangunan Nasional, yang disusun pemerintah berupa Repelita.

B. Keadaan Wilayah

Setelah kemerdekaan keadaan wilayah Wonogiri secara geografis terletak pada $7^{\circ} 32' - 8^{\circ} 15'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 41' - 111^{\circ} 18'$ Bujur Timur. Keadaan alamnya sebagian besar terdiri dari pegunungan yang berbatu gamping, terutama di bagian Selatan, termasuk jajaran Pegunungan Seribu yang merupakan mata air dari Bengawan Solo. Wonogiri beriklim tropis dan mempunyai 2 musim yaitu penghujan dan kemarau dengan temperatur rata-rata 24-32 derajat celsius.

Luas daerah Wonogiri menurut Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) sensus pertanian bulan Maret 1983 adalah 182.236,0236 ha terbagi atas 24 kecamatan dan 43 kelurahan. Batas daerah Wonogiri adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan (Jatim) dan Samudera Indonesia.
- Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo.
- Sebelah Barat : Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara administrasi Kabupaten Wonogiri dibagi menjadi 5 wilayah pembantu bupati yaitu Wuryantoro, Wonogiri, Baturetno, Jatisrono dan Purwantoro. Wuryantoro memiliki 4 kecamatan yaitu Pracimantoro, Eromoko, Wuryantoro dan Manyaran. Wonogiri memiliki 4 kecamatan yaitu Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo dan Nguntoronadi. Baturetno memiliki 7 kecamatan yaitu Giritontro, Giriwoyo, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Karangtengah dan Paranggupito. Kecamatan yang termasuk wilayah Jatisrono meliputi Sidoharjo, Jatiroto, Jatisrono, Jatipurno dan Girimarto. Purwantoro

memiliki 4 kecamatan yaitu Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto dan Slogohimo.

C. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri pada tahun 1999 adalah 1.103.073 jiwa. Dengan jumlah rumah tangga sebesar 222.371, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 543.564 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebesar 559.509 jiwa. Kepadatan penduduk diperinci per kecamatan per kilometer persegi pada tahun 1999 adalah 659 jiwa.

2. Angkatan Kerja

Jumlah pencari kerja yang terdaftar (belum ditempatkan) pada tahun 1999/2000 adalah 12597 orang, dengan jumlah 6762 orang laki-laki dan 5835 orang perempuan. Sedangkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 1999/2000 adalah sebesar 8437 orang, dengan jumlah 4560 orang laki-laki dan 3877 orang perempuan.

D. Keadaan Ekonomi

Sektor- sektor ekonomi yang ada di daerah Wonogiri antara lain sektor pertanian dan perkebunan, sektor industri dan perdagangan, sektor perhubungan dan sektor pariwisata.

1. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Pada sektor pertanian, tanaman yang dihasilkan di daerah Wonogiri antara lain padi sawah, padi gogo, ketela rambat, kacang tanah, jagung, ketela pohon, kedelai dan kacang hijau, sedangkan produksi buah-buahan antara lain alpukat dan mangga. Hasil produksi yang terbesar adalah dari padi sawah dan padi gogo sebanyak 304779 ton pada tahun 1999 dengan luas panen sebesar 43247 ha untuk padi sawah dan 16775 ha untuk padi gogo.

Tanaman produksi yang dihasilkan dari sektor perkebunan antara lain komoditi kelapa dalam, kelapa hybrida, kelapa deres dan cengkih. Jumlah produksi yang terbesar adalah kelapa dalam yaitu sebesar 56051 butir pada tahun 1999, sedangkan untuk komoditi cengkih jumlah produksinya sebesar 1137480 ton.

Potensi hutan berdasarkan fungsinya di kabupaten Wonogiri adalah hutan lindung, hutan produksi, suaka cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata dan hutan tujuan istimewa. Luas seluruhnya pada tahun 1999 adalah 20897,60 ha. Jenis tanaman yang ada meliputi pinus, sonokeling, mahoni, jati, *gemelina*, *cyclo*, *accasia decuren*, johar dan mimbo.

2. Sektor Industri dan Perdagangan

Jenis industri yang ada di kabupaten Wonogiri meliputi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan antara lain : Modeling dan komponen bahan bangunan furniture/perabot rumah tangga dari kayu, makanan dari

kedelai dan kacang-kacangan, roti dan sejenisnya, furniture dari bambu, pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, minyak atsiri. Sedangkan Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka antara lain pengecoran logam bukan besi, barang galian bukan logam, genteng, pembakaran batu kapur, reparasi kendaraan dan percetakan (sablon).

Nilai penjualan barang-barang ekspor non migas kabupaten Wonogiri tahun 1999/2000 keseluruhannya mencapai Rp 75.933.954.000,00 yang meliputi komoditi chip gapplek, jamu tradisional, kacang mete, mebel kayu, mebel rotan, minyak atsiri, *parquet block* / tegel kayu jati, ikan air tawar, tepung tapioka dan janggolan.

Perdagangan berkembang pesat dengan ditandai dibukanya toko swalayan dan dealer-dealer di Wonogiri. Luasnya pangsa pasar di Wonogiri menyebabkan banyak perusahaan tertarik untuk memasarkan produk-produk mereka. Produk –produk yang ditawarkan antara lain: alat-alat rumah tangga, alat elektronik dan barang-barang lainnya.

Pemasaran produk-produk tersebut biasanya melalui iklan baik dalam bentuk selebaran, *billboard* maupun spanduk. Banyaknya perusahaan yang memasarkan produk mereka melalui iklan menyebabkan bertambahnya pendapatan pajak reklame di Kabupaten Wonogiri. Hal ini merupakan sinyal positif bagi penambahan pendapatan asli daerah setempat.

Selain banyak dibuka toko, di Wonogiri juga banyak didirikan restoran yang berlokasi sebagian besar adalah di kecamatan Wonogiri.

Pembukaan restoran dan café juga menambah pemasukan bagi penerimaan pajak restoran, dan hal ini diperkirakan akan bertambah setiap tahun.

3. Sektor Perhubungan

Sektor perhubungan turut mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi yang lain, karena dengan adanya angkutan antar kota dan antar propinsi maka kegiatan di bidang ekonomi dapat berlangsung dengan lancar. Jenis angkutan yang ada di kabupaten Wonogiri meliputi angkutan barang dan angkutan penumpang. Pada tahun 1999 jumlah perusahaan angkutan penumpang adalah 176 buah. Jenis angkutan penumpang meliputi bus antar kota dalam propinsi, bus antar kota antar propinsi, mini bus/angkutan pedesaan dan angkuta, dengan jumlah armada sebanyak 1433 armada. Untuk angkutan barang meliputi Truk 2 As, Truk 3 As dan Pick Up/Box. Jumlah perusahaan pada tahun 1999 sebanyak 1859, sedangkan jumlah armadanya sebanyak 3755 buah.

4. Sektor Pariwisata

Potensi obyek wisata yang ada di kabupaten Wonogiri antara lain waduk serba guna Gajah Mungkur, Tugu Pusaka, Gunung Giri, Gunung Gandul, Kayangan, Goa-goa Stalaktit dan Stalakmit, Pantai Nampu dan Sembukan, Taman Selopadi, Jala Terapung dan arena pancingan. Jumlah pendapatan obyek wisata Gajah Mungkur pada tahun 1999 adalah sebesar Rp 191.107.200,00 yang diperoleh dari karcis masuk dan pendapatan lain-lain, dengan jumlah pengunjung 275.449 orang.

Berkembangnya potensi obyek wisata di Kabupaten Wonogiri secara tidak langsung juga menyebabkan berkembangnya usaha yang bergerak di bidang jasa hotel. Karena sebagian besar objek pariwisata tersebut terletak di kecamatan Wonogiri, maka pendirian hotel di Kabupaten Wonogiri hanya terdapat di Kecamatan Wonogiri. Alasan lain mengapa pendirian hotel hanya terdapat di Kecamatan Wonogiri karena kecamatan-kecamatan lain merupakan daerah pedesaan yang tidak memungkinkan untuk didirikan hotel sebab kemungkinan besar tidak akan ada pengunjung.

Adanya potensi objek wisata juga dapat digunakan untuk menambah pemasukan pajak hiburan karena di objek-objek wisata tersebut dapat diadakan berbagai macam hiburan, apalagi pada saat hari libur atau hari besar.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri antara lain: Pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut adalah : Perda No.1 Tahun 1998, Perda No.2 Tahun 1998, dan Perda No.3 Tahun 1998. Menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri, potensi objek pajak jumlahnya tidak selalu meningkat tetapi kadangkala juga mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan objek pajak ini menyebabkan terjadinya perkembangan pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri mengenai anggaran dan realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000

Sektor pajak	Tahun Anggaran (Rupiah)					
	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	Apr-Des '00
- Pajak Reklame	11.000.000	13.500.000	15.000.000	16.500.000	17.500.000	14.500.000
- Pajak Hotel dan Restoran	40.000.000	50.000.000	57.500.000	61.000.000	63.000.000	30.000.000
- Pajak Hiburan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	10.000.000
Jumlah	61.000.000	73.500.000	82.500.000	88.500.000	91.500.000	54.500.000

Sumber : Perhitungan APBD Kabupaten Wonogiri

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000

Sektor pajak	Tahun Anggaran (Rupiah)					
	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	Apr-Des '00
- Pajak Reklame	12.602.236	13.797.322	14.507.294	14.319.345	18.841.375	16.296.085
- Pajak Hotel dan Restoran	42.813.750	48.370.350	58.027.210	60.960.993	66.110.044	32.314.850
- Pajak Hiburan	10.016.128	9.620.475	9.549.214	8.718.943	17.158.771	14.353.480
Jumlah	65.432.114	71.788.147	82.084.718	83.999.281	102.110.190	62.964.415

Sumber : Perhitungan APBD Kabupaten Wonogiri

Data lain mengenai rekapitulasi penyeteroran pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame serta penambahan dan pengurangan jumlah wajib pajak dapat dilihat pada lampiran. Secara jelasnya perkembangan dan prediksi pendapatan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan Tahun 1999/2000.

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame, maka akan dibahas perbandingan antara anggaran dan realisasi serta kenaikan dan penurunannya dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000 sebagai berikut :

1. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1995/1996

Perbandingan pendapatan masing-masing sektor pajak dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1995/1996

Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1995/1996		Naik/Turun Realisasi	
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	(Rp)	%
- Pajak Reklame	11.000.000	12.602.236	1.602.236	14
- Pajak Hotel dan Restoran	40.000.000	42.813.750	2.813.750	7
- Pajak Hiburan	10.000.000	10.016.128	16.128	0.2
Jumlah	61.000.000	65.432.114	4.432.114	7

Dari tabel 5.3 di atas dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut :

Anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan pada tahun 1995/1996 adalah sebesar Rp 61.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 65.432.114,00. Dari realisasi pendapatan pajak daerah dengan jumlah anggaran yang ditetapkan terjadi selisih lebih atau kenaikan sebesar Rp 4.432.114,00 atau sebesar 7%. Peningkatan atau kenaikan tersebut dapat dilihat dari semua sektor pajak yang ada yaitu pemasukan dari pajak hotel dan restoran terjadi selisih lebih dalam realisasinya sebesar Rp 2.813.750,00. Kenaikan ini disebabkan adanya pertambahan jumlah pendapatan pajak restoran dari beberapa kecamatan di antaranya dari kecamatan Manyaran dan Pracimantoro. Kenaikan untuk pajak hiburan adalah sebesar Rp 16.128,00 dan

kenaikan untuk pajak reklame sebesar Rp 1.602.236,00. Kenaikan untuk pajak hiburan disebabkan bertambahnya pertunjukan insidentil di kecamatan Karangtengah dan Tirtomoyo yaitu sebesar Rp 89.035,00 dan Rp 111.000,00 (lihat lampiran). Kenaikan pajak reklame disebabkan bertambahnya jumlah pemasang reklame.

2. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1996/1997

Perbandingan masing-masing sektor pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1996/1997

Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1996/1997		Naik/Turun Realisasi	
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	(Rp)	%
- Pajak Reklame	13.500.000	13.797.322	297.322	2
- Pajak Hotel dan Restoran	50.000.000	48.370.350	(1.629.650)	-3
- Pajak Hiburan	10.000.000	9.620.475	(379.525)	-4
Jumlah	73.500.000	71.788.147	(1.711.853)	-2

Dari tabel 5.4 di atas dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan pada tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp 73.500.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp 71.788.147,00. Dalam realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp



11.711.000,00 atau sebesar 2% dari anggaran yang telah ditetapkan. Penurunan tersebut terjadi pada sektor pajak hotel dan restoran sebesar Rp 1.629.650,00. Hal ini disebabkan berkurangnya pendapatan pajak restoran dari beberapa kecamatan yaitu kecamatan Eromoko, Tirtomoyo, Jatisrono, Jatipurno, Girimarto, Kismantoro dan pendapatan dari RM Mila Sari dan CFC. Pajak hiburan mengalami penurunan sebesar Rp 379.525,00 disebabkan karena berkurangnya pertunjukan insidentil di beberapa kecamatan (lihat lampiran tabel 9). Kenaikan realisasi terjadi pada sektor pajak reklame sebesar Rp 297.322,00 disebabkan bertambahnya jumlah pemasang reklame, yaitu dari 24 badan usaha pada tahun anggaran 1995/1996 menjadi 28 badan usaha pada tahun anggaran 1996/1997.

3. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1997/1998

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1997/1998 dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1997/1998

Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1997/1998		Naik/Turun Realisasi	
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	(Rp)	%
- Pajak Reklame	15.000.000	14.507.294	(492.706)	-3
- Pajak Hotel dan Restoran	57.500.000	58.027.210	527.210	0.9
- Pajak Hiburan	10.000.000	9.549.214	(450.786)	-5
Jumlah	82.500.000	82.083.718	(416.282)	-0.5

Dari tabel 5.5 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut :

Anggaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp 82.500.000,00 dalam realisasinya menjadi sebesar Rp 82.083.718,00. Jadi dalam realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp 416.282,00 atau sebesar 0,5%. Penurunan ini terjadi pada sektor pajak reklame dan pajak hiburan. Pajak reklame mengalami penurunan sebesar Rp 492.706,00; hal ini disebabkan oleh berkurangnya perusahaan pemakai jasa ijin pasang reklame baru, dimana perusahaan pemasang reklame tersebut memberi pemasukan yang cukup besar, misal: GE Lighting dan Unileverindo. Pajak hiburan turun sebesar Rp 450.786,00 disebabkan oleh berkurangnya pertunjukan insidentil di beberapa kecamatan. Sektor pajak yang mengalami kenaikan adalah pajak hotel dan restoran sebesar Rp 527.210,00. Penyebab kenaikan ini adalah bertambahnya pendapatan pajak restoran dari beberapa kecamatan dan bertambahnya jumlah obyek pajak hotel dan restoran di kecamatan Wonogiri.

4. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1998/1999

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1998/1999 dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1998/1999

Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1998/1999		Naik/Turun Realisasi	
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	(Rp)	%
- Pajak Reklame	16.500.000	14.319.345	(2.180.655)	-13
- Pajak Hotel dan Restoran	61.000.000	60.960.993	(39.007)	-0,1
- Pajak Hiburan	11.000.000	8.718.943	(2.281.057)	-21
Jumlah	88.500.000	83.999.281	(4.500.719)	-5

Dari tabel 5.6 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut :

Anggaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp 88.500.000,00 dan dalam realisasinya menjadi sebesar Rp 83.999.281,00. Jadi dalam realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp 4.500.719,00 atau 5%. Penurunan ini terjadi pada semua sektor pajak. Penurunan sebesar Rp 2.180.655,00 pada realisasi pendapatan pajak reklame disebabkan menurunnya jumlah pemasang reklame melalui spanduk dan reklame papan akibat krisis moneter. Menurut data dari Dinas Pendapatan Daerah, pada tahun anggaran 1997/1998 jumlah pemasang reklame spanduk sebanyak 10 badan usaha dan jumlah pemasang reklame papan sebanyak 20 badan usaha,

sedangkan pada tahun anggaran 1998/1999 menurun menjadi 7 pemasang reklame spanduk dan 16 badan usaha pemasang reklame papan. Penurunan realisasi pajak hiburan sebesar Rp 2.281.057,00 disebabkan berkurangnya pertunjukan insidental di beberapa kecamatan dan juga karena berkurangnya jumlah obyek pajak. Penurunan pajak hotel dan restoran sebesar Rp 39.007,00 disebabkan karena ada beberapa restoran di kecamatan Wonogiri yang tidak buka usaha lagi yaitu rumah makan Mila Sari dan CFC.

5. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1999/2000

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1999/2000 dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut :

Tabel 5.7
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1999/2000

Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1999/2000		Naik/Turun Realisasi	
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	(Rp)	%
- Pajak Reklame	17.500.000	35.137.460	17.637.460	100
- Pajak Hotel dan Restoran	63.000.000	79.251.194	16.251.194	26
- Pajak Hiburan	11.000.000	31.512.251	20.512.251	186
Jumlah	91.500.000	145.900.905	54.400.905	59

Dari tabel 5.7 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut :

Anggaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp 91.500.000,00 dalam realisasinya menjadi sebesar Rp 102.110.190,00. Jadi

dalam realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp 10.610.190,00 atau sebesar 12%. Kenaikan realisasi ini terjadi pada semua sektor pajak. Pajak reklame mengalami kenaikan sebesar Rp 1.341.375,00 atau sebesar 8% disebabkan karena meningkatnya pemasangan reklame spanduk dari 7 pemasang menjadi 46 pemasang dan kenaikan pemasangan reklame selebaran dari 29 pemasang menjadi 38 pemasang. Kenaikan sebesar Rp 3.110.044,00 atau 5% pada penerimaan pajak hotel dan restoran disebabkan bertambahnya jumlah objek pajak hotel dan restoran di kecamatan Wonogiri dan bertambahnya pendapatan pajak restoran dari beberapa kecamatan. Kenaikan pajak hiburan sebesar Rp 6.158.771,00 disebabkan bertambahnya jumlah pertunjukan insidental dan adanya pertunjukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata.

6. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Bulan April sampai dengan Desember 2000

Perubahan penggunaan tahun anggaran yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang dimulai pada tahun anggaran 2001 menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri membuat perencanaan pendapatan pajak daerah selama 9 bulan yaitu dari 1 April sampai dengan 31 Desember 2000. Untuk lebih jelasnya perbandingan pendapatan pajak daerah dari 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1999/2000

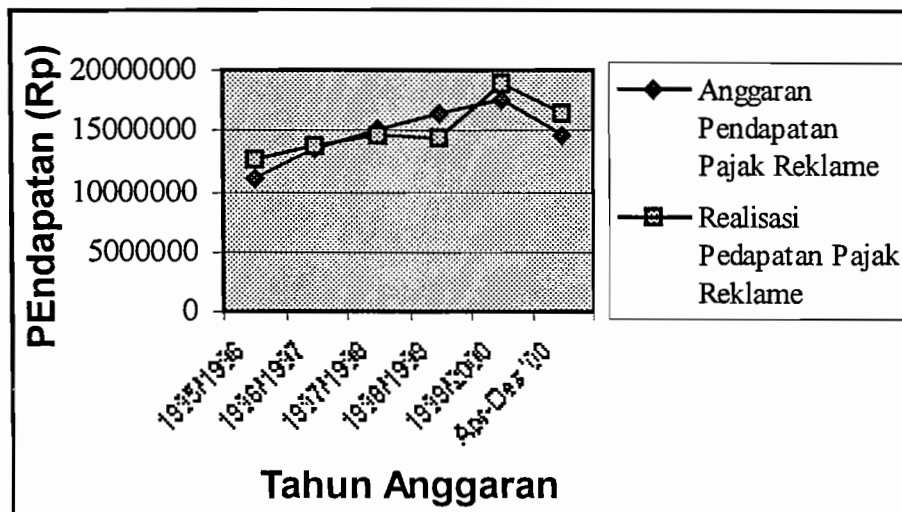
Sektor Pajak	April-Desember 2000		Naik/Turun Realisasi	
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	(Rp)	%
- Pajak Reklame	14.500.000	16.296.085	1.796.085	12
- Pajak Hotel dan Restoran	30.000.000	32.314.850	2.314.850	8
- Pajak Hiburan	10.000.000	14.353.480	4.353.480	43
Jumlah	54.000.000	62.964.415	8.464.415	15

Dari tabel 5.8 di atas dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

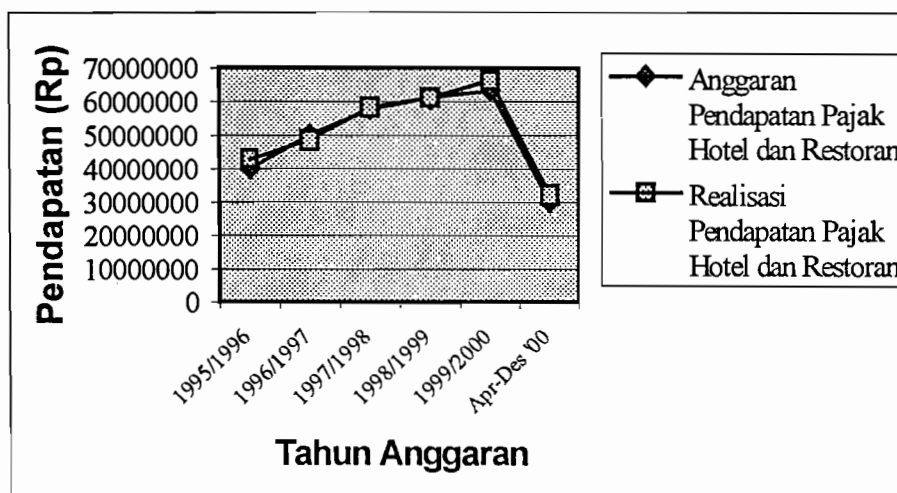
Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 54.500.000,00 dalam realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp 8.464.415,00 atau 15%. Kenaikan tersebut terjadi untuk semua sektor pajak. Pajak hotel dan restoran mengalami kenaikan sebesar Rp 2.314.850,00 atau 8% disebabkan karena bertambahnya jumlah pendapatan pajak restoran dari setiap kecamatan. Pajak reklame mengalami kenaikan sebesar Rp 1.796.085,00 atau 12% disebabkan karena bertambahnya jumlah pemasang reklame baru (lihat lampiran tabel 18). Pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp 4.353.480,00 atau 43% disebabkan karena adanya pertunjukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata pada saat lebaran.

Dari perbandingan-perbandingan di atas dapat dilihat bahwa antara anggaran dan realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran, pajak reklame dan pajak hiburan selalu mengalami ketidaktepatan. Kenaikan dan penurunan antara anggaran dan

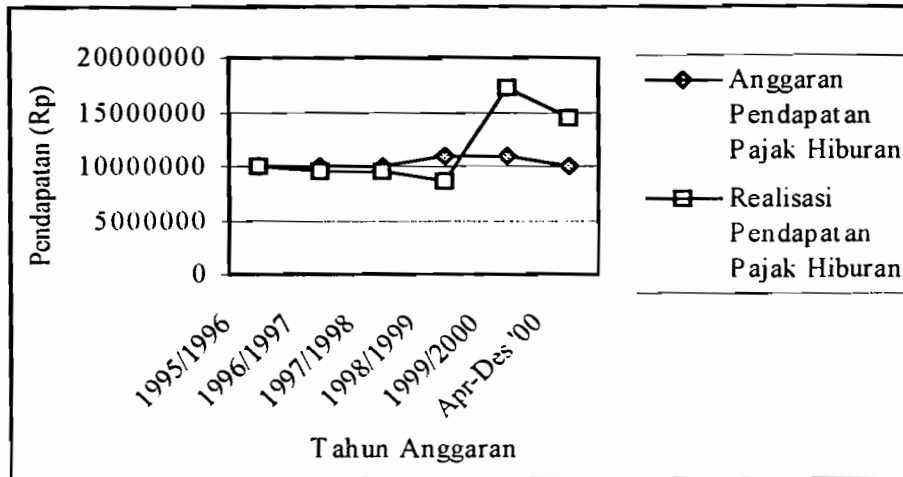
realisasi pendapatan masing-masing sektor pajak tersebut dapat dilihat secara jelas melalui grafik 5.1, grafik 5.2 dan grafik 5.3 di bawah ini :



Grafik 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame dari Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000



Grafik 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000



Grafik 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000

Perkembangan realisasi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.9
Perkembangan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000

Tahun Anggaran	Kenaikan/Penurunan Realisasi	%
1996/1997 atas 1995/1996	6.356.033	10
1997/1998 atas 1996/1997	10.296.571	14
1998/1999 atas 1997/1998	1.914.563	2
1999/2000 atas 1998/1999	18.110.909	21
Jumlah	36.678.076	47

B. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa antara anggaran pendapatan pajak daerah dengan realisasinya dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 selalu mengalami ketidaktepatan. Ketidaktepatan ini dapat berupa kenaikan atau penurunan realisasi yang diperoleh (lihat pembahasan masalah 1). Ketidaktepatan penentuan anggaran dapat mempengaruhi alokasi pendanaan/pembelanjaan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus dapat membuat perencanaan pendapatan pajak daerah yang tepat agar tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar antara anggaran dan realisasinya.

Menurut Dinas Pendapatan Daerah, proyeksi/prediksi rencana pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan 2005 secara prinsip tidak ada, karena pendapatan direncanakan setiap tahun berdasarkan evaluasi realisasi tahun yang lalu dan berdasarkan perkiraan adanya penambahan potensi baru. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan alternatif lain dalam penentuan prediksi atau prakiraan pendapatan pajak daerah. Prediksi pendapatan pajak daerah ini dibagi menjadi 3 sektor prediksi, dengan menggunakan metode garis lurus dengan persamaan $Y = a + bx$. Prediksi-prediksi untuk ketiga sektor pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Reklame untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun 2005.

Untuk mencari nilai dari persamaan $Y = a + bx$ digunakan tabel 5.9 berikut ini:

Tabel 5.10
Perhitungan Trend Pendapatan
Pajak Reklame

Tahun Anggaran	X	Y	XY	X ²
1995/1996	-2	12.602.236	-25.204.472	4
1996/1997	-1	13.797.322	-13.797.322	1
1997/1998	0	14.507.294	0	0
1998/1999	1	14.319.345	14.319.345	1
1999/2000	2	18.841.375	37.682.750	4
JUMLAH	0	74.067.572	13.000.301	10

Dari tabel di atas kemudian dicari persamaan $Y = a + bx$

$$\begin{aligned} \text{Untuk } a &= \frac{\sum Y}{N} \\ &= \frac{74.067.572}{5} \\ &= 14813.514 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{untuk } b &= \frac{\sum XY}{X^2} \\ &= \frac{13.000.301}{10} \\ &= 1.300.030 \end{aligned}$$

setelah nilai a dan b diketahui kemudian di buat persamaan yaitu :

$$Y = 14.813.514 + 1.300.030 (X).$$

Dari persamaan tersebut dibuat prediksi pendapatan pajak reklame untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagai berikut

$$\text{Tahun 2001, } Y = 14.813.514 + 1.300.030 \quad (3)$$

$$Y = 18.713.604$$

$$\text{Tahun 2002, } Y = 14.813.514 + 1.300.030 \quad (4)$$

$$Y = 20.013.634$$

$$\text{Tahun 2003, } Y = 14.813.514 + 1.300.030 \quad (5)$$

$$Y = 21.313.664$$

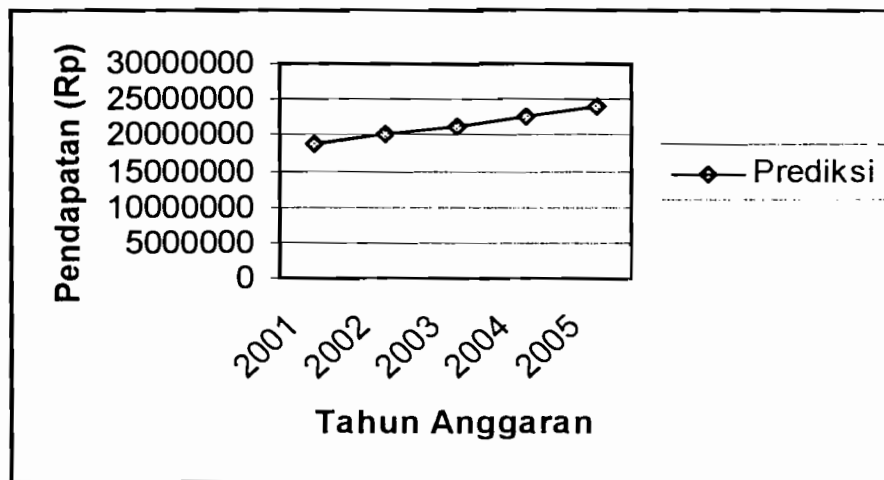
$$\text{Tahun 2004, } Y = 14.813.514 + 1.300.030 \quad (6)$$

$$Y = 22.613.694$$

$$\text{Tahun 2005, } Y = 14.813.514 + 1.300.030 \quad (7)$$

$$Y = 23.913.724$$

Setelah prediksi pendapatan pajak reklame untuk tahun anggaran 2001 sampai 2005 diketahui kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik 5.4 berikut:



**Grafik 5.4 Prediksi Pendapatan Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005**

Berdasarkan perhitungan prediksi pajak reklame di atas, maka untuk anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari tahun anggaran 2001 sampai dengan 2005 seharusnya sama atau lebih tinggi dari hasil perhitungan prediksi di atas.

2. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hotel dan Restoran untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2005.

Untuk mencari nilai dari persamaan $Y = a + bx$ digunakan tabel 5.10 berikut ini:

Tabel 5.11
Perhitungan Trend Pendapatan
Pajak Hotel dan Restoran

Tahun Anggaran	X	Y	XY	X ²
1995/1996	-2	42.813.750	-85.627.500	4
1996/1997	-1	48.730.350	-48.370.350	1
1997/1998	0	58.027.210	0	0
1998/1999	1	60.960.993	60.960.993	1
1999/2000	2	66.110.044	132.220.088	4
JUMLAH	0	276.282.347	59.220.088	10

Dari tabel di atas kemudian dicari persamaan $Y = a + bx$

$$\begin{aligned} \text{Untuk } a &= \frac{\sum Y}{N} \\ &= \frac{276.282.347}{5} \\ &= 55.256.469 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{untuk } b &= \frac{\sum XY}{X^2} \\ &= \frac{59.183.231}{10} \\ &= 5.918.323 \end{aligned}$$

setelah nilai a dan b diketahui kemudian di buat persamaan yaitu :

$$Y = 55.256.469 + 5.918.323 (X).$$

Dari persamaan tersebut dibuat prediksi pendapatan pajak hotel dan restoran untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2001, } Y = 55.256.469 + 5.918.323 \quad (3)$$

$$Y = 73.011.438$$

$$\text{Tahun 2002, } Y = 55.256.469 + 5.918.323 \quad (4)$$

$$Y = 78.929.761$$

$$\text{Tahun 2003, } Y = 55.256.469 + 5.918.323 \quad (5)$$

$$Y = 84.848.084$$

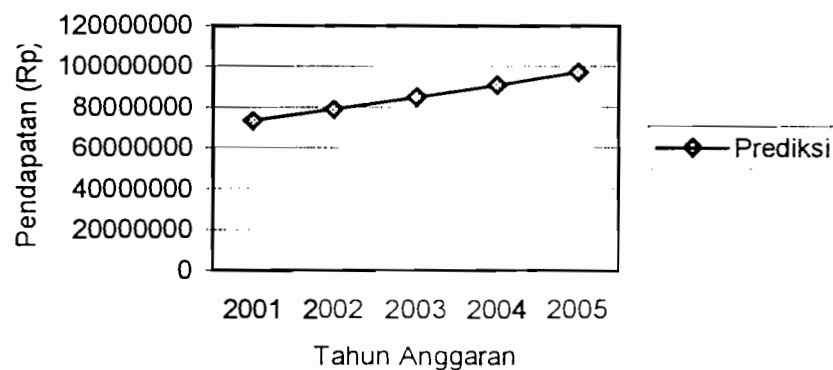
$$\text{Tahun 2004, } Y = 55.256.469 + 5.918.323 \quad (6)$$

$$Y = 90.766.407$$

$$\text{Tahun 2005, } Y = 55.256.469 + 5.918.323 \quad (7)$$

$$Y = 96.684.730$$

Penerapan garis trend untuk prediksi pendapatan pajak hotel dan restoran untuk tahun anggaran 2001 sampai 2005 dapat dilihat pada grafik 5.5 berikut :



**Grafik 5.5 Prediksi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran
Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005**

Berdasarkan perhitungan prediksi pajak hotel dan restoran di atas, maka untuk anggaran pajak hotel dan restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari tahun anggaran 2001 sampai dengan 2005 seharusnya sama atau lebih tinggi dari hasil perhitungan prediksi di atas.

3. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hiburan untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005.

Untuk mencari nilai dari persamaan $Y = a + bx$ digunakan tabel 5.11 berikut ini:

Tabel 5.12
Perhitungan Trend Pendapatan
Pajak Hiburan

Tahun Anggaran	X	Y	XY	X ²
1995/1996	-2	10.016.128	-20.032.256	4
1996/1997	-1	9.620.475	-9.620.475	1
1997/1998	0	9.549.214	0	0
1998/1999	1	8.718.943	8.718.943	1
1999/2000	2	17.158.771	34.317.542	4
JUMLAH	0	55.063.531	13.383.754	10

Dari tabel di atas kemudian dicari persamaan $Y = a + bx$

$$\begin{aligned} \text{Untuk } a &= \frac{\sum Y}{N} \\ &= \frac{55.063.531}{5} \end{aligned}$$

$$= 11.012.706$$

$$\begin{aligned} \text{untuk } b &= \frac{\sum XY}{X^2} \\ &= \frac{13.383.754}{10} \\ &= 1.338.375 \end{aligned}$$

setelah nilai a dan b diketahui kemudian di buat persamaan yaitu :

$$Y = 11.012.706 + 1.338.375 (X).$$

Dari persamaan tersebut dibuat prediksi pendapatan pajak hotel dan restoran

untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2001, } 11.012.706 + 1.338.375 \quad (3)$$

$$Y = 15.027.831$$

$$\text{Tahun 2002, } Y = 11.012.706 + 1.338.375 \quad (4)$$

$$Y = 16.366.206$$

$$\text{Tahun 2003, } Y = 11.012.706 + 1.338.375 \quad (5)$$

$$Y = 17.704.581$$

$$\text{Tahun 2004, } Y = 11.012.706 + 1.338.375 \quad (6)$$

$$Y = 19.042.956$$

$$\text{Tahun 2005, } Y = 11.012.706 + 1.338.375 \quad (7)$$

$$Y = 20.381.331$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun Anggaran 2001} &= 18.713.604 + 73.011.438 + 15.027.831 \\ &= 106.752.873 \end{aligned}$$

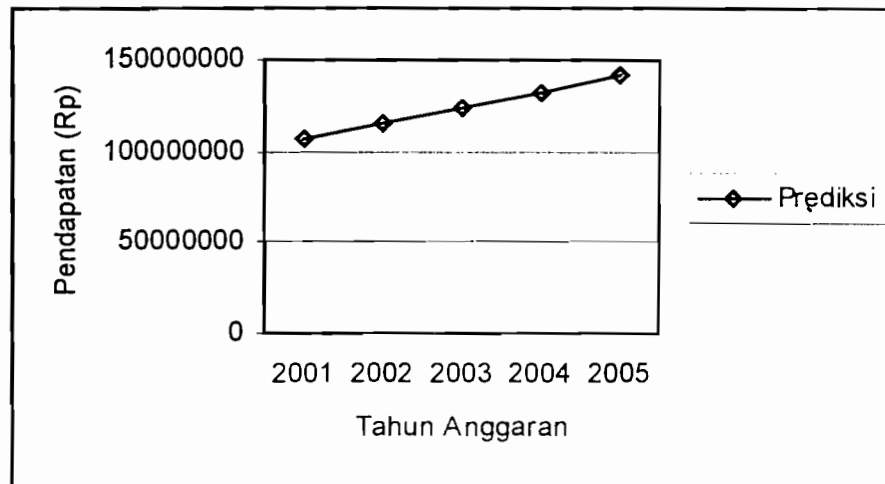
$$\begin{aligned} \text{Tahun Anggaran 2002} &= 20.013.634 + 78.929.761 + 16.366.206 \\ &= 115.309.601 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun Anggaran 2003} &= 21.313.664 + 84.848.084 + 17.704.581 \\ &= 123.866.329 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun Anggaran 2004} &= 22.613.694 + 90.766.407 + 19.042.956 \\ &= 132.423.057 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun Anggaran 2005} &= 23.913.724 + 96.684.730 + 20.381.331 \\ &= 140.979.785 \end{aligned}$$

Penerapan garis trend untuk prediksi pendapatan pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame) dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah sebagai berikut:



**Grafik 5.7 Prediksi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005**

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan pendapatan pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame) Kabupaten Wonogiri dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun 1999/2000 mengalami kenaikan dan penurunan antara anggaran dan realisasinya. Penyebab kenaikan dan penurunan masing-masing sektor pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Reklame

Penyebab kenaikan yang terjadi pada tahun anggaran 1995/1996 dan tahun anggaran 1996/1997 disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemasang reklame. Penurunan yang terjadi pada tahun anggaran 1997/1998 disebabkan berkurangnya perusahaan pemakai jasa ijin pasang reklame baru. Penurunan yang terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 disebabkan menurunnya jumlah pemasang reklame spanduk dan reklame papan akibat krisis moneter. Kenaikan yang terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 disebabkan oleh meningkatnya pemasangan spanduk reklame dan reklame selebaran.

b. Pajak Hotel dan Restoran

Kenaikan pajak hotel dan restoran pada tahun anggaran 1995/1996 disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah pendapatan pajak restoran dari beberapa kecamatan. Penurunan yang terjadi pada tahun 1996/1997 disebabkan karena berkurangnya pendapatan pajak dari beberapa kecamatan. Kenaikan pada tahun 1997/1998 disebabkan karena bertambahnya pendapatan pajak restoran dari beberapa kecamatan dan bertambahnya jumlah obyek pajak hotel dan restoran di kecamatan Wonogiri. Penurunan yang terjadi pada tahun 1998/1999 disebabkan karena sebagian rumah makan tutup (tidak buka usaha). Kenaikan pada tahun 1999/2000 disebabkan meningkatnya jumlah objek pajak.

c. Pajak Hiburan

Kenaikan yang terjadi pada tahun anggaran 1995/1996 disebabkan karena bertambahnya pertunjukan insidentil di beberapa kecamatan. Penurunan yang terjadi pada tahun anggaran 1996/1997, tahun 1997/1998 dan tahun 1998/1999 disebabkan oleh berkurangnya pertunjukan yang bersifat insidentil di beberapa kecamatan, sedangkan kenaikan yang terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 disebabkan adanya pertunjukan yang diadakan di objek pariwisata.

2. Prediksi pendapatan pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame) untuk tahun-tahun mendatang berdasarkan

perhitungan yang telah dilakukan mengalami kecenderungan naik.

Prediksi-prediksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tahun anggaran 2001 sebesar Rp 106.752.873,00
- b. Tahun anggaran 2002 sebesar Rp 115.309.601,00
- c. Tahun anggaran 2003 sebesar Rp 123.866.329,00
- d. Tahun anggaran 2004 sebesar Rp 132.423.057,00
- e. Tahun anggaran 2005 sebesar Rp 140.979.785,00

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri, ada sebagian data yang tidak bisa penulis temukan yaitu data mengenai jumlah obyek pajak hotel dan restoran yang ada di kecamatan-kecamatan selain Kecamatan Wonogiri tidak ada, karena data tersebut berada pada Dinas Pasar masing-masing kecamatan.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis akan memberikan saran dan masukan yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri khususnya bagi Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya informasi yang jelas dari pemerintah daerah setempat mengenai prosedur pembayaran bagi wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah. Pemberitahuan melalui surat kabar, radio dan media komunikasi lainnya perlu digalakkan sehingga masyarakat sebagai wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Aparat Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk dapat mengembangkan administrasi dan operasional secara profesional dan optimal, khususnya untuk penarikan pajak hotel dan restoran di kecamatan-kecamatan selain Kecamatan Wonogiri yang penarikannya diserahkan pada Dinas Pasar masing-masing kecamatan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.
3. Dalam memprediksikan pendapatan daerah untuk tahun-tahun yang akan datang, pemerintah daerah jangan hanya berdasarkan evaluasi terhadap realisasi tahun yang lalu dan perkiraan adanya penambahan potensi baru, namun hendaknya juga berdasarkan perhitungan yang cermat, sehingga penyusunan anggarannya lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Baswir, Revrisond. (1995). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

BPS. (1999). *Wonogiri dalam Angka 1999*. Wonogiri: Biro Pusat Statistik.

Budiyuwono, Nugroho. (1995). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: UPP AMP.

_____ (1997). *Keputusan Menteri Dalam Negeri*. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

_____ (1997). *Lima Undang-undang Perpajakan*. Jakarta: CV. Eko Jaya. ✓

Mardiasmo. (1997). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Munawir. (1990). *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.

Pemda Wonogiri. (1998). *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri*. Wonogiri: Pemda.

Pemda Wonogiri. (1990). *Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No.5 tahun 1990*. Wonogiri: Pemda.

_____ (1999). *Sepuluh Undang-undang 1999*. Jakarta: CV. Eko Jaya. ✓

Sumitro, Rachmat. (1988). *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresci. ✓

Zandjani, Amadhi Chairul Tubagus. (1992). *Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia ✓
Pustaka Utama.

LAMPIRAN

Tabel 1
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hotel dan Restoran
Tahun Anggaran 1995/1996

Nama Badan Usaha (Kecamatan)	Jumlah (Rupiah)
1. Wonogiri :	
a. Hotel Giri Asri	960.100
b. Hotel Wisma Giri	450.200
c. Hotel Sendang Asri	315.100
d. Hotel Larasati	860.200
e. Hotel Watu Gede	1.115.000
f. Hotel Sidodadi	255.000
g. Hotel Sarimurni	672.000
h. Hotel Giri Loko	979.200
i. Hotel Griya Wisata	717.000
j. Hotel Adem Ayam	818.100
k. RM Mila Sari	415.600
l. CFC	380.500
m. RM Soto Gading	295.600
n. RM Ayam	395.000
o. RM Ayam PG	425.000
2. Pracimantoro	2.172.600
3. Eromoko	1.795.100
4. Wuryantoro	2.055.600
5. Manyaran	1.989.000
6. Selogiri	2.004.000
7. Ngadirojo	1.235.000
8. Nguntoronadi	1.857.100
9. Giritontro	1.546.900
10. Giriwoyo	1.435.600
11. Batuwarno	1.717.400
12. Tirtomoyo	1.050.100
13. Baturetno	1.991.100
14. Karangtengah	1.218.100
15. Paranggupito	1.581.000
16. Sidoharjo	1.768.700
17. Jatiroto	950.050
18. Jatisrono	1.050.800
19. Jatipurno	990.000
20. Girimarto	1.541.000
21. Kismantoro	695.000
22. Purwantoro	1.075.000
23. Bulukerto	1.200.000
24. Slogohimo	841.000
Jumlah	42.813.750

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 2
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hotel dan Restoran
Tahun Anggaran 1996/1997

Nama Badan Usaha (Kecamatan)	Jumlah (Rupiah)
1. Wonogiri :	
a. Hotel Giri Asri	1.000.400
b. Hotel Wisma Giri	495.200
c. Hotel Sendang Asri	340.500
d. Hotel Larasati	989.800
e. Hotel Watu Gede	1.284.000
f. Hotel Sidodadi	265.100
g. Hotel Sarimurni	865.000
h. Hotel Giri Loko	1.119.000
i. Hotel Agung	343.300
j. Hotel Griya Wisata	855.000
k. Hotel Suko Asih	689.100
l. Hotel Adem Ayam	955.400
m. RM Mila Sari	345.900
n. CFC	365.800
o. RM Soto Gading	350.000
p. RM Pojok	415.600
q. RM Ayam	515.400
r. RM Ayam PG	535.000
2. Pracimantoro	2.565.100
3. Eromoko	1.665.400
4. Wuryantoro	2.434.190
5. Manyaran	2.054.000
6. Selogiri	2.219.000
7. Ngadirojo	1.587.000
8. Nguntoronadi	2.050.000
9. Giritontro	1.998.000
10. Giriwoyo	1.856.000
11. Batuwarno	2.250.000
12. Tirtomoyo	997.100
13. Baturetno	2.156.000
14. Karangtengah	1.515.400
15. Paranggupito	1.817.500
16. Sidoharjo	1.850.000
17. Jatiroto	997.500
18. Jatisrono	987.400
19. Jatipurno	900.800
20. Girimarto	981.060
21. Kismantoro	581.000
22. Purwantoro	1.080.000
23. Bulukerto	1.247.400
24. Slogohimo	851.000
Jumlah	48.370.350

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 3
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hotel dan Restoran
Tahun Anggaran 1997/1998

Nama Badan Usaha (Kecamatan)	Jumlah (Rupiah)
1. Wonogiri :	
a. Hotel Giri Asri	1.055.100
b. Hotel Wisma Giri	584.100
c. Hotel Sendang Asri	360.000
d. Hotel Larasati	1.142.450
e. Hotel Watu Gede	1.334.550
f. Hotel Sidodadi	270.900
g. Hotel Sarimurni	895.000
h. Hotel Giri Loko	1.276.500
i. Hotel Agung	377.000
j. Hotel Griya Wisata	935.100
k. Hotel Dewi Anita	197.900
l. Hotel Suko Asih	773.700
m. Hotel Adem Ayam	966.000
n. RM Mila Sari	223.870
o. CFC	374.100
p. RM Soto Gading	360.000
q. RM Pojok	398.500
r. RM Ayam	533.800
s. RM Ayam PG	540.000
2. Pracimantoro	2.986.400
3. Eromoko	1.750.000
4. Wuryantoro	2.990.000
5. Manyaran	2.125.000
6. Selogiri	2.387.400
7. Ngadirojo	1.875.100
8. Nguntoronadi	2.489.000
9. Giritontro	2.315.000
10. Giriwoyo	2.100.000
11. Batuwarno	3.590.000
12. Tirtomoyo	1.300.100
13. Baturetno	2.589.200
14. Karangtengah	1.836.420
15. Paranggupito	1.981.200
16. Sidoharjo	2.979.000
17. Jatiroto	1.050.000
18. Jatisrono	1.265.000
19. Jatipurno	1.195.800
20. Girimarto	1.084.900
21. Kismantoro	645.020
22. Purwantoro	2.498.000
23. Bulukerto	1.289.000
24. Slogohimo	1.107.100
Jumlah	58.027.210

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 4
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hotel dan Restoran
Tahun Anggaran 1998/1999

Nama Badan Usaha (Kecamatan)	Jumlah (Rupiah)
1. Wonogiri :	
a. Hotel Giri Asri	1.014.700
b. Hotel Wisma Giri	784.200
c. Hotel Sendang Asri	330.000
d. Hotel Larasati	999.000
e. Hotel Watu Gede	1.259.500
f. Hotel Sidodadi	237.500
g. Hotel Sarimurni	827.000
h. Hotel Giri Loko	1.122.500
i. Hotel Agung	343.550
j. Hotel Griya Wisata	830.200
k. Hotel Dewi Anita	133.100
l. Hotel Suko Asih	721.100
m. Hotel Adem Ayam	905.600
n. RM Bu Pur	165.000
o. RM Bu Wignyo	462.500
p. RM Soto Gading	210.000
q. RM Pojok	397.500
r. RM Ayam	334.500
s. RM Ayam PG	540.000
t. RM Soto	140.000
u. RM Ayam Bakar Nyoto	720.000
Roso	3.150.800
2. Pracimantoro	1.950.700
3. Eromoko	3.819.400
4. Wuryantoro	2.115.000
5. Manyaran	2.496.000
6. Selogiri	1.989.000
7. Ngadirojo	2.572.543
8. Nguntoronadi	2.418.100
9. Giritontro	2.543.800
10. Giriwoyo	3.714.000
11. Batuwarno	1.315.400
12. Tirtomoyo	2.769.000
13. Baturetno	1.845.600
14. Karangtengah	2.051.800
15. Paranggupito	3.378.000
16. Sidoharjo	1.097.000
17. Jatiroto	1.345.800
18. Jatisrono	1.205.600
19. Jatipurno	1.245.800
20. Girimarto	815.000
21. Kismantoro	2.560.000
22. Purwantoro	1.117.800
23. Bulukerto	967.400
24. Slogohimo	
Jumlah	60.960.993

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 5
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hotel dan Restoran
Tahun Anggaran 1999/2000

Nama Badan Usaha (Kecamatan)	Jumlah (Rupiah)
1. Wonogiri :	
a. Hotel Giri Asri	1.020.000
b. Hotel Wisma Giri	1.372.400
c. Hotel Sendang Asri	330.000
d. Hotel Larasati	1.139.000
e. Hotel Watu Gede	1.275.000
f. Hotel Sidodadi	282.900
g. Hotel Sarimurni	861.000
h. Hotel Giri Loko	1.134.500
i. Hotel Agung	348.350
j. Hotel Griya Wisata	754.220
k. Hotel Dewi Anita	135.500
l. Hotel Suko Asih	759.400
m. Hotel Adem Ayam	935.700
n. Hotel Sari Mulyo	483.100
o. RM Bu Pur	165.000
p. RM Bu Wignyo	474.500
q. RM Soto Gading	240.000
r. RM Pojok	402.500
s. RM Ayam	315.000
t. RM Ayam PG	495.000
u. RM Soto	154.000
v. RM Ayam Bakar Nyoto Roso	660.000
w. RM Selera	150.000
x. Soto Pokoh	145.000
y. RM P.Kasiyo	70.000
z. RM Soto Bu Ning	105.000
aa. Kafe Kartini	121.250
2. Pracimantoro	3.910.400
3. Eromoko	1.810.500
4. Wuryantoro	3.150.110
5. Manyaran	2.750.650
6. Selogiri	3.855.700
7. Ngadirojo	1.870.400
8. Nguntoronadi	2.348.964
9. Giritontro	2.618.900
10. Giriwoyo	2.817.400
11. Batuwarno	3.910.400
12. Tirtomoyo	1.356.600
13. Baturetno	2.890.000
14. Karangtengah	1.975.800
15. Paranggupito	2.115.400
16. Sidoharjo	3.465.300
17. Jatiroto	1.181.300
18. Jatisrono	1.910.000
19. Jatipurno	1.215.400
20. Girimarto	1.345.800

21. Kismantoro	
22. Purwantoro	465.100
23. Bulukerto	2.565.900
24. Slogohimo	1.217.900
	1.033.800
Jumlah	66.110.044

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 6
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hotel dan Restoran
Bulan April-Desember 2000

Nama Badan Usaha (Kecamatan)	Jumlah (Rupiah)
1. Wonogiri :	
a. Hotel Giri Asri	610.000
b. Hotel Wisma Giri	675.000
c. Hotel Sendang Asri	210.500
d. Hotel Larasati	795.000
e. Hotel Watu Gede	915.600
f. Hotel Sidodadi	200.775
g. Hotel Sarimurni	315.400
h. Hotel Giri Loko	545.700
i. Hotel Agung	270.000
j. Hotel Griya Wisata	565.100
k. Hotel Dewi Anita	87.200
l. Hotel Suko Asih	687.300
m. Hotel Adem Ayem	545.100
n. Hotel Sari Mulyo	255.050
o. RM Bu Pur	81.000
p. RM Bu Wignyo	215.400
q. RM Soto Gading	156.800
r. RM Pojok	286.000
s. RM Ayam	210.000
t. RM Ayam PG	345.100
u. RM Soto	82.200
v. RM Ayam Bakar Nyoto Roso	418.100
w. RM Selera	65.000
x. Soto Pokoh	57.800
y. RM P.Kasiyo	35.400
z. RM Soto Bu Ning	85.100
aa. Kafe Kartini	49.800
2. Pracimantoro	1.889.100
3. Eromoko	959.400
4. Wuryantoro	1.500.100
5. Manyaran	1.100.000
6. Selogiri	1.800.900
7. Ngadirojo	845.700

8. Nguntoronadi	1.245.000
9. Giritontro	1.000.500
10. Giriwoyo	991.400
11. Batuwarno	1.215.000
12. Tirtomoyo	675.625
13. Baturetno	1.375.400
14. Karangtengah	785.000
15. Paranggupito	975.500
16. Sidoharjo	1.489.550
17. Jatiroto	415.100
18. Jatisrono	791.400
19. Jatipurno	582.500
20. Girimarto	695.000
21. Kismantoro	125.400
22. Purwantoro	1.878.800
23. Bulukerto	675.000
24. Slogohimo	538.000
Jumlah	32.314.850

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 7
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 1995/1996

Nama Badan Usaha/Kecamatan	Jumlah (Rupiah)
1. Palupi Billyard	2.193.993
2. Giri Cahaya I	2.085.000
3. Giri Cahaya II	1.787.800
4. Festival Musik	200.500
5. Olga Billyard	935.400
6. KFC Sepak Bola	328.300
7. Video Game	523.500
8. Panti Pijat Hasti	938.300
9. Pertunjukan Insidental :	
a. Eromoko	208.900
b. Purwantoro	115.100
c. Selogiri	95.500
d. Nguntoronadi	105.400
e. Manyaran	125.800
f. Kismantoro	54.600
g. Baturetno	118.000
h. Karangtengah	89.035
i. Tirtomoyo	111.000
Jumlah	10.016.128

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 8
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 1996/1997

Nama Badan Usaha (Kecamatan)	Jumlah (Rupiah)
1. Giri Cahaya I	3.127.655
2. Giri Cahaya II	2.413.885
3. Palupi Billyard	1.347.300
4. Olga Billyard	886.400
5. Pentas Musik	225.000
6. Sepak Bola	250.000
7. Pasar Malam	100.500
8. Festival Musik	112.200
9. Pertunjukan Insidental :	
9. a. Pracimantoro	230.900
b. Jatisrono	378.335
c. Bulukerto	205.400
d. Sidoharjo	115.100
e. Slogohimo	95.600
f. Wuryantoro	54.300
g. Tirtomoyo	26.100
h. Karangtengah	51.800
Jumlah	9.620.475

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 9
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 1997/1998

Nama Badan Usaha (Kecamatan)	Jumlah (Rupiah)
1. Giri Cahaya I	2.856.510
2. Giri Cahaya II	2.372.415
3. Palupi Billyard	1.297.350
4. Olga Billyard	1.182.360
5. Pentas Musik	445.000
6. Sepak Bola	200.000
7. PT. Gudang Garam	400.000
8. Festival Musik	115.000
9. Pertunjukan Insidental :	
9. a. Purwantoro	200.710
9. b. Wuryantoro	150.800
9. c. Baturetno	56.750
9. d. Eromoko	110.800
9. e. Nguntoronadi	161.519
Jumlah	9.549.214

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 10
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 1998/1999

Nama Badan Usaha (Kecamatan)	Jumlah (Rupiah)
1. Giri Cahaya I	2.500.523
2. Giri Cahaya II	2.042.930
3. Palupi Bilyard	1.993.940
4. Panakawan Entertainment	688.140
5. Pentas Lumba-lumba	1.575.000
6. Pasar Malam	871.270
7. Haitop	1.150.900
8. Sepak Bola	53.750
9. Pertunjukan Insidental :	
a. Sidoharjo	28.180
b. Ngadirojo	35.200
c. Jatisrono	42.250
Jumlah	8.718.943

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 11
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 1999/2000

Nama Badan Usaha (Kecamatan)	Jumlah (Rupiah)
1. Giri Cahaya I	2.471.062,50
2. Giri Cahaya II	898.400
3. Palupi Billyard	734.512,50
4. Puri Perkasa	25.000
5. Video Game Bulusulur	45.000
6. Video Game Terminal	45.000
7. Video Game Slo	15.000
8. Video game BLK	37.500
9. Video Game PLY	22.500
10. Billyard	15.000
11. Video Game	52.500
12. Video Game	52.500
13. Video Game	15.000
14. PT. Bentoel Prima	99.000
15. PT. Nikki Super	114.000
16. Video Game	12.000
17. Wahana Satu	200.000
18. Renjos	100.000
19. Shailan 7	400.000
20. Video Game	15.000
21. Festival Musik	574.000
22. Drs. Yusuf Pristiadi	100.000
23. Sepak Bola Widoro	50.000
24. Sepak Bola KFC	200.000
25. Video Game Cahaya	54.450
26. PT. Radio Gelora Indah Suara	60.000
27. Video Game	49.065
28. Dinas Pariwisata	7.258.240
29. Satwa Langka dan Aneh	1.570.500
30. Landes Surya Gemilang	1.150.000
31. Madesa Didi K	64.500
32. Video Game	9.000
33. Pertunjukan Insidental :	
a. Slogohimo	150.041
b. Purwantoro	120.000
c. Jatisrono	85.400
d. Ngadirojo	94.600
e. Jatipurno	100.000
f. Pracimantoro	100.000
Jumlah	17.158.771

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 12
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Hiburan
Bulan April-Desember 2000

Nama Badan Usaha	Jumlah (Rupiah)
1. Media Arta	400.000
2. Palupi Bilyard	861.525
3. Festival Musik	150.000
4. Sepak Bola KFC	200.000
5. PT Radio Gelora Indah Suara	814.500
6. Giri Cahaya I	488.505
7. Dinas Pariwisata	8.528.350
8. Landes Surya Gemilang	950.000
9. Giri Cahaya II	400.000
10. Berkah Ria Putra	100.000
11. Band ADA	250.000
12. Festival Alas Ketu	30.000
13. Putra Giri	125.000
14. Favorite Cup 2000	100.000
15. Alex Tony Sunaryo	205.500
16. CMS	542.600
17. Pyramid Expo 2000	97.500
18. Pasar Malam	110.000
Jumlah	14.353.480

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 13
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Reklame
Tahun Anggaran 1995/1996

Nama Badan Usaha	Jumlah
1. Unileverindo	1.950.400
2. PT. Mayora	915.600
3. PT. Yoga Prananta	186.500
4. Biro Iklan	314.500
5. Suara Merdeka	156.100
6. Sanggar Pratama	18.100
7. GE Lighting	1.693.602
8. Toko Baru	51.000
9. SMEA Sudirman	21.100
10. Landes Gemilang	118.000
11. Viva Cosmetics	219.000
12. HM Sampoerna	1.915.000
13. Pratama Motor	545.000
14. UNIBA	108.200
15. SMA Bakti	19.400
16. ABA St. Pignateli	135.100
17. PT. Gudang Garam	520.000

18. PT. Bentoel Biru	1.119.800
19. PT. Alam Sari	213.000
20. UNTAG	108.100
21. PT. Nestle	510.000
22. PT. Deltomed	750.150
23. PT. Air Mancur	360.100
24. STARKO	654.484
Jumlah	12.602.236

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 14
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Reklame
Tahun Anggaran 1996/1997

Nama Badan Usaha	Jumlah
1. Rokok Menara	250.000
2. Unileverindo	1950.400
3. Wartel Hidayah	18.100
4. RS Marga Husada	156.270
5. UMS	215.000
6. STIE Swastamandiri	181.000
7. Univ. Veteran	95.400
8. Off Road	214.100
9. Festival Musik	100.500
10. Altex TB Karya Indah	29.100
11. TK Elektro	12.800
12. Argo Sumijo	31.200
13. Restoran Mila Sari	25.100
14. PT. HM Sampoerna	1.915.000
15. Nissin	815.000
16. Yoga Motor	545.000
17. LPK Persada	215.000
18. AMIK Harapan Bangsa	40.000
19. SMU PGRI I	7.500
20. SMK 02	40.000
21. PT. Djarum Super	818.000
22. AAK	25.000
23. ATW Ska	109.100
24. PT. Genta Buana	1.250.000
25. PT. Deltomed	750.150
26. PT. Wings	1.150.000
27. Djarum 76	1.145.000
28. GE Lighting	1.693.602
Jumlah	13.797.322

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 15
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Reklame
Tahun Anggaran 1997/1998

Nama Badan Usaha	Jumlah
1. PT. Karka Hamukti	64.800
2. PT. Pratama Kurnia	30.000
3. PT. Astra Honda Supra	272.000
4. PT. Friesche Vlag	25.500
5. PT. Karka Mukti	8.100
6. PT. Surya Mas	633.125
7. Rizky Adv Marlboro	176.500
8. PT. Gudang Garam	33.000
9. Perum Pegadaian	45.000
10. Bank BNI 46	15.000
11. Maspion	238.000
12. Papan Nama BRI	1.759.200
13. Rolan Swalayan	139.500
14. Produk Konimex	127.500
15. Media Artha	38.400
16. PT. Intercalin	229.500
17. PT. Lokaniaga	67.500
18. Jaya Sakti Motor	25.500
19. STIMIK AKI	75.400
20. Foto Akbar	30.800
21. PT. Karunia Abadi	315.400
22. CV. Adi Pratama	98.100
23. PT. Marlboro	1.915.000
24. National Gobel	210.000
25. Festival Musik	620.000
26. Toko Baru	135.000
27. PT. Deltomed	750.150
28. Wartel Aminah	18.150
29. SMA Kanisius	31.400
30. Lenggy Entertainment	510.000
31. PT. Nikki Super	125.000
32. Fuji Film	235.000
33. Kodak	213.095
34. PT. HM Sampoerna	529.300
35. PT. Genta Buana	1.250.000
36. Djarum 76	1.145.000
37. UMS	215.400
38. ATW	113.400
39. Jaya Abadi	150.400
40. UTP	51.800
41. Landes Surya Gemilang	1.404.074
Jumlah	14.507.294

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 16
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Reklame
Tahun Anggaran 1998/1999

Nama Badan Usaha	Jumlah
1. PT. Karka Hamukti	64.800
2. PT. Pratama Kurnia	30.000
3. PT. Astra Honda Supra	272.000
4. PT. Friesche Vlag	25.500
5. PT. Karka Mukti	8.100
6. PT. Surya Mas	633.125
7. Rizky Adv Marlboro	176.500
8. PT. Gudang Garam	33.000
9. Perum Pegadaian	45.000
10. Bank BNI 46	15.000
11. Maspion	238.000
12. Papan Nama BRI	1.759.200
13. Rolan Swalayan	139.500
14. Produk Konimex	127.500
15. Media Artha	38.400
16. PT. Intercalin	229.500
17. PT. Lokaniaga	67.500
18. Jaya Sakti Motor	25.500
19. PT. Deltomed	600.000
20. UMS	215.400
21. PT. Unileverindo	577.500
22. ATW	113.400
23. PT. HM Sampoerna	529.300
24. PT Konimex	84.375
25. PT. EKMA 84	355.000
26. PT. Air Mancur	937.400
27. PT. Bentoel Prima	351.720
28. Festival Musik	80.100
29. Biro Iklan	625.000
30. Wartel Candra Dewi	12.500
31. PT. Kawasaki	93.750
32. Wartel Adhi	15.400
33. Wings Surya	378.000
34. PT. Bentoel Merah	3.518.880
35. PT. Panca Usaha	234.000
36. CV. Cempaka	180.000
37. PT. Sanbe Farma	108.000
38. CV. Medi Artha	192.750
39. LBB Gama	16.200
40. SMK Sudirman I	48.000
41. SMK Muhamadiyah 4	45.000
42. SLTP Kanisius	18.000
43. SLTP Muhamadiyah 8	30.000
44. Univ. Muhamadiyah	108.000
45. UNIBA	18.900
46. AKPER PENDA	54.000

47. AUB	115.400
48. AAK	18.900
49. LPK Elite	47.250
50. Maspion	136.000
51. Rokok Menara	320.000
52. Kodak	213.095
Jumlah	14.319.345

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 17
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Reklame
Tahun Anggaran 1999/2000

Nama Badan Usaha	Jumlah
1. Apotik Gajah Mungkur	21.250
2. PT. Karka Mukti	56.520
3. PT. Deltomed	600.000
4. PT. Gudang Garam	189.000
5. Papan Nama BRI	1.759.200
6. Produk Konimex	127.500
7. Media Artha	834.500
8. Jaya Sakti Motor	13.500
9. PT. Tecma	76.800
10. Sansa Adv	18.900
11. AUB SKA	42.000
12. Media Utama	221.000
13. PT. Loka Niaga Adi P	458.000
14. Gufa El Fani	294.225
15. PT. Unileverindo	577.500
16. AAK Nasional	18.900
17. ATW	113.400
18. Toko Pas Jean	11.250
19. Puri Perkasa	7.500
20. Akper Penda	54.000
21. Hery Ieksono	15.000
22. SMK 02 SKH	42.000
23. SMK Muh. 02	56.700
24. Kursus Ternak Jangkrik	27.750
25. SMK Sudirman	48.000
26. SMK Muh. 4	45.000
27. SLTP Kanisius	18.000
28. SLTP Muh. 8	30.000
29. Scorpio	147.000
30. SMU PGRI I	7.500
31. Swas VCD	24.300
32. Deras AVD	87.500
33. Yayasan Tunas Bangsa	12.000
34. Henpun baru	12.420
35. Persada Bakti Komputer	32.400
36. Univ. Muh. Ponorogo	108.000
37. Wartel Melati	6.000
38. AMIK Harapan Bangsa	40.500

39. Penerimaan mahasiswa baru	13.500
40. LPK Mahardika	18.900
41. PT. HM Sampoerna	529.300
42. UNIBA	18.900
43. Toko Bina Karya	17.000
44. Karya Mulia	88.000
45. LPK Damar Aji	50.000
46. POLTEK	18.900
47. PT. Nikki Super	189.000
48. PT. Konimex	84.375
49. Depo Sara Lee	22.500
50. PT. Tecma	138.900
51. PT. Nara Adv	56.700
52. PT. EKMA 84	355.000
53. PT. Bentoel Prima	351.720
54. PT. Nikki Super	36.000
55. RCT	28.350
56. LPK ELITE	47.250
57. Asia Telle	91.375
58. BP2K Citra Husada	22.500
59. Stass	16.200
60. PT. Rona Damar Sejati	17.000
61. PT. Friesche Vlag	189.000
62. Festival Musik	145.500
63. Bharepta Corp.	15.000
64. PT. Air Mancur	937.400
65. PT. Kawasaki	93.750
66. Bentoel Mild	96.000
67. Wings Surya	378.000
68. Pijat Urat	10.625
69. PT. Indo Food	459.000
70. Toko Pakaian	54.000
71. Alumni SMA 3 WNG	56.700
72. Mara Adv	120.000
73. Biro Iklan	625.000
74. Wartel Candra Dewi	12.500
75. Rukun Mulia Maspion	136.000
76. Solo Motor	19.687
77. Yong Motor	142.625
78. Jun Deras	29.250
79. Maspion	119.000
80. Maspion	153.000
81. Maspion	85.000
82. Maspion	170.000
83. Maspion	102.000
84. Agus Pranoto	10.710
85. PT. Bentoel Merah	3.518.880
86. Maspion	119.000
87. Altex karya Indah	25.500
88. Altex Karya Baru	76.500
89. Altex Ngudi Rukun	17.000
90. PT. Panca Usaha Sukses	234.000
91. CV. Cempaka	180.000
92. RS. Marga Husada	80.000
93. CV. Medi Artha	192.750
94. Rokok Menara	320.000
95. Rama Fuji	238.500
96. PT. Karka	9.450
97. PT. Radio Gelora Indah	52.500
98. Yasuka Motor	42.500

99. Panorama	63.750
100. Karya Tunggal	68.000
101. Honda Sumber Karya	68.000
102. Honda Karya Abadi	68.000
103. PT. Nikki Super	162.000
104. Landes Surya Gemilang	219.000
105. CV. Arina dencow	120.000
106. Bakso Putra Daerah	10.200
107. Sanggar Pandowo	10.000
108. LBB Gama 88	16.200
109. KT Sanbe Farma	108.000
110. Karya Satria	80.000
111. TB Satria	115.512
Jumlah	18.841.375

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Tabel 18
Daftar Rekapitulasi Penyetoran
Pajak Reklame
Bulan April-Desember 2000

Nama Badan Usaha	Jumlah (Rupiah)
1. PT. Astra Honda Supra	272.000
2. PT. Karka Mukti Adv.	172.450
3. PT. Surya Mas Adv.	745.800
4. PT. Deltomed	940.000
5. PT. Gudang Garam	110.700
6. Media Artha	301.500
7. PT. Intercalin	229.500
8. Jaya Sakti Motor	55.500
9. Hotel Giriloka	12.750
10. PT. Tecma	120.000
11. PT. Spectra	144.500
12. PT. Loka Niaga Adi Pratama	240.000
13. Gufa El Hafani	45.000
14. AAK Nasional Ska.	18.900
15. ATW	63.000
16. SMK Muh. II Wuryantoro	84.000
17. SLTP. Kanisius Wonogiri	36.000
18. SMU. PGRI I Wng.	54.000
19. Yayasan Tunas Bangsa	11.250
20. Universitas Muh. Ponorogo	30.000
21. PT. HM Sampoerna	762.690
22. Toko Bina Karya	17.000
23. Karya Mulya	20.000
24. LPK Damar Aji	164.250
25. PT. Konimex	88.800
26. Depo Sara Lee	3.000
27. PT. Ekma 84	94.500
28. PT. Tekma	25.000
29. Asia Tele	91.375
30. PT. Rona Damar Sejahtera	17.000
31. PT. Friesche Flag	76.500
32. PT. Air Mancur	762.300

33. Sepak Bola KFC	60.000
34. PT. Kawasaki	93.750
35. Bentoel Mild	226.020
36. Wings Surya	324.000
37. Pijat Urat	12.500
38. PT. Indofood	357.000
39. Jun Deras	328.570
40. Foto Menara	187.500
41. PT. Radio Gelora Indah Suara	228.275
42. Yasuka Motor	22.500
43. Landes Surya Gemilang	1.206.000
44. Madeso Didi Kempot	122.000
45. PT. Sanbe Farma	108.000
46. Jialing	27.675
47. STIMIK AKI	85.500
48. Toko Buku Naga Mas	34.000
49. PT. Gawih Jaya	590.400
50. Matahari Elektronik	22.500
51. PT. Petro Jaya Boral Plasterboar	136.000
52. Amigo	365.300
53. Pyramid	13.500
54. STIE STIKUBANK	63.000
55. Scorpio	33.750
56. Diana Roti	34.000
57. Akademi Harapan Bangsa	66.000
58. Pas Jeans	21.000
59. FEUTP	63.000
60. Tk. Sumber Agung	34.000
61. RM. Bakso Raksasa	30.000
62. SJS	36.000
63. LPK Cipta Bakti Husada	15.000
64. Akper Patria Husada	21.600
65. RP Tujuh	21.600
66. Pratama Mulya	18.900
67. CV. Joglo Jaya	108.000
68. SMK Sahid Ska.	16.200
69. STIE Pignateli	37.800
70. ASDI	75.600
71. PT. Adi Kartika Jaya	1.080.000
72. Candra Motor	27.000
73. Akper UNMUH	18.000
74. LPK Citra Bunda	12.000
75. LPK Nita Putra	382.500
76. UNIBA	18.900
77. PT. Ekma	411.000
78. LLKS	54.000
79. LPK Persada Komputer	54.000
80. Kondang Motor	10.500
81. Karunia Raya Motor	42.000
82. Salon Maria	12.750
83. Biro ACC	26.000
84. TH Motor	30.000
85. Sarimi	27.000
86. Mebel Beta	8.500
87. Apeka Karanganyar	37.800
88. UNIVET Bentara	7.500
89. LPK GCC	85.000
90. RM Ning II	51.000
91. Maspion	59.500

92. Toko Laris	25.500
93. Toko Baru Ada	25.500
94. GT Radial	102.000
95. UTP	9.000
96. PT. Alam Indo Megah	43.200
97. UNISRI	54.000
98. CV. Karya Indah	22.100
99. PT. Niki Super	108.000
100. Favorite Cup 2000	150.000
101. PT. Pratama Kurnia Kasih	390.000
102. Nurul Ilmi	58.500
103. Lembaga Pendidikan	72.000
104. Alex Tony Sunaryo	54.000
105. Primagama	48.600
106. Ngadirojo Motor	50.000
107. Wahana Kreasi Muda	132.300
108. PT. Putra Surya Multi Dana	85.000
109. PT. Bumi Asih Jaya	61.200
110. Viva Motor	51.840
111. CMS	272.175
112. PT. Dian Abadi Perkasa	153.000
113. KPN Warah	46.050
114. Prodia	6.000
115. Fun Off Road	9.000
116. Pyramid Expo 2000	150.000
117. CV. Cempaka	90.000
118. GO Iklan	30.240
119. PT. Loka Niaga Adi Pratama	46.125
120. SIP Cabang Skh.	22.500
121. PT. Loka Niaga Adi Pratama	48.000
122. Bengawan Adv.	18.000
123. Joglo Jaya Entertainment	36.000
124. Pabelan Griyo Mukti	38.400
125. PT. Phapros	277.200
Jumlah	16.296.085

Sumber : Perhitungan PAD Kabupaten Wonogiri

Lampiran : Peraturan Daerah Tingkat II Wonogiri.
 Nomor : 3 Tahun 1998.
 Tanggal : 9 Maret 1998.

Nomor	Lokasi Penyelenggaraan dan jenis Reklame	Tarif Pajak Per M2 dalam rupiah												
		Dalam Ruangan	Tempat Pemasangan Reklame diluar Ruangan											
			Bangunan/Tanah Sendiri				Bangunan/Tempat Sendiri				Bangunan/Tanah Pemda			
			Diatas Tanah Pemda											
		Hari	Minggu	Bulan	Tahun	Hari	Minggu	Bulan	Tahun	Hari	Minggu	Bulan	Tahun	
A. REKLAME PAPAN														
I. JALAN PROTOKOL														
1. Reklame Papan	50	75	400	1.250	8.500	100	500	1.500	10.000	125	600	1.750	12.500	
2. Reklame Bersinar	100	150	750	2.500	12.500	175	800	2.750	15.000	200	1.000	3.000	17.500	
II. JALAN EKONOMI														
1. Reklame Papan	50	50	250	1.000	7.500	75	400	1.250	10.000	100	500	1.200	10.000	
2. Reklame Bersinar	50	100	500	1.500	10.000	125	600	1.750	12.500	150	750	2.500	15.000	
		Dalam Ruangan	Hari	Minggu	Bulan	Tahun	Hari	Minggu	Bulan	Tahun	Hari	Minggu	Bulan	Tahun
							1 Kali Putar	1 Kali Siaran mini	1 Kali Peraga	Tiap Lembar				
B. Reklame Kain Tiap M2	100	1.250	1.500	3.000										
C. 1. Reklame Film						500								
2. Slide Kaca				1.500		500								
3. Treiler						400								
D. Reklame Suara							150							
E. Reklame Kendaraan		150	750	2.000										
F. Reklame Peragaan								15.000						
G. Reklame Tempel= 0,5 M2														
H. Selebaran 0,125 M2		125	600	1.800						750				

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 W O N O G I R I
 K E T U A
 Cap ttd-
 UTOMO, TS.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 W O N O G I R I

Cap ttd.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. RM. Said No. Telp. (0273) 22805 Fax 22804

WONOGIRI Kode Pos 57652

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072 / 179.

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa :

N a m a : ELLI HAYANI.
N I H : 962114198.
Program Studi : Akuntansi.
Jurusan : Akuntansi.
Fakultas : Ekonomi, UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA.

Pada bulan Desember 2000 s/d bulan Maret 2001 telah mengadakan penelitian skripsi dengan judul :

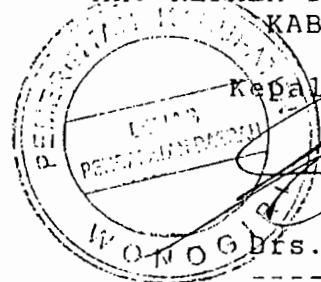
" PERKEHIBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH ".

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 19 Maret 2001.

An KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI.

Kepala Bagian Tata Usaha.



Drs. TEGUH BUDIYONO.

Penata Tingkat I.
NIP. 500 082 612.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah pembentukan kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana keadaan geografi Pemerintah Daerah Tingkat II Wonogiri?
3. Bagaimana keadaan penduduk Pemerintah Daerah Tingkat II Wonogiri?
4. Bagaimana keadaan sektor ekonomi Pemerintah Daerah Tingkat II Wonogiri?
5. Ada berapa sektor pajak yang dipungut oleh Pemda tingkat II Wonogiri?
6. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut?
7. Bagaimana prosedur pengesahan pajak daerah?
8. Berapa anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 1995/1996 sampai 1999/2000?
9. Berapa realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 1995/1996 sampai 1999/2000?
10. Antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan apakah mengalami kenaikan/penurunan?
11. Apa saja yang menyebabkan kenaikan/penurunan pendapatan pajak daerah?
12. Bagaimana proyeksi atau prediksi pendapatan pajak daerah yang telah dibuat oleh Pemda tingkat II untuk tahun anggaran 2001 sampai 2005?
13. Usaha apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah?

